



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018
(AUDITED)



BAGIAN ANGGARAN 087



LAPORAN KEUANGAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(AUDITED)

Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada ANRI. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Jakarta, April 2019
Sekretaris Utama,

Sumrahyadi

NIP 19611009 198703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	50
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	73
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	92
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	108
F. Pengungkapan Penting Lainnya	112

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 (AUDITED)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Tahun 2018 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, April 2019

Inspektur,


Syaifuddin

NIP. 19643112 199303 1 001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 (*Audited*) Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, April 2019
Kepala,

Mustari Irawan

NIP 19590621 198703 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (netto) sebesar Rp11.663.284.224,00 atau mencapai 86,55 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp13.475.086.000,00.

Realisasi Belanja Negara (bruto) pada TA 2018 untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp190.711.584.773,00 atau mencapai 97,54 persen dengan pengembalian belanja sebesar Rp853.883.752,00, sehingga Realisasi Belanja Negara (netto) sebesar Rp189.857.701.021,00 atau mencapai 97,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp195.514.015.000,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Real. thd Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	13.475.086.000,00	11.663.284.224,00	86,55%	10.731.461.038,00
Belanja Negara	195.514.015.000,00	189.857.701.021,00	97,11%	211.468.865.417,00

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

AKUN	PAGU	REALISASI BRUTO		PENGEMBALIAN BELANJA (Rp)	REALISASI NETTO	
		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
51	84.287.121.000,00	84.103.692.174,00	99,78	85.168.479,00	84.018.523.695,00	99,68
52	89.055.692.000,00	84.702.431.194,00	95,11	768.130.273,00	83.934.300.921,00	94,25
53	22.171.202.000,00	21.905.461.405,00	98,80	585.000,00	21.904.876.405,00	98,80
JUMLAH	195.514.015.000,00	190.711.584.773,00	97,54	853.883.752,00	189.857.701.021,00	97,11

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp471.732.755.011,00 yang terdiri dari: Aset Lancar (netto) sebesar Rp2.268.275.397,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp466.871.545.072,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp2.592.934.542,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.458.992.441,00 dan Rp469.273.762.570,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	(%)
Aset				
Aset Lancar	2.268.275.397,00	1.418.722.018,00	849.553.379,00	59,88
Aset Tetap	466.871.545.072,00	440.760.227.333,00	26.111.317.739,00	5,92
Aset Lainnya	2.592.934.542,00	2.663.831.272,00	(70.896.730,00)	(2,66)
Jumlah Aset	471.732.755.011,00	444.842.780.623,00	26.889.974.388,00	6,04
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	2.458.992.441,00	582.542.659,00	1.876.449.782,00	322,11
Jumlah Kewajiban	2.458.992.441,00	582.542.659,00	1.876.449.782,00	322,11
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana	469.273.762.570,00	444.260.237.964,00	25.013.524.606,00	5,63
Jumlah Ekuitas Dana	469.273.762.570,00	444.260.237.964,00	25.013.524.606,00	5,63
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	471.732.755.011,00	444.842.780.623,00	26.889.974.388,00	6,04

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.385.593.550,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp195.424.680.354,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp184.039.086.804,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp24.359.919.114,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp208.399.005.918,00.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Operasional	11.385.593.550,00	34.476.486.575,00	(23.090.893.025,00)	(66,98)
Beban Operasional	195.424.680.354,00	192.465.875.827,00	2.958.804.527,00	1,54
Surplus/defisit dari operasi	(184.039.086.804,00)	(157.989.389.252,00)	(26.049.697.552,00)	16,49
Kegiatan Non Operasional	(24.359.919.114,00)	499.891.240,00	(24.859.810.354,00)	(4.973,04)
Pos-pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/defisit dari non operasi	(24.359.919.114,00)	499.891.240,00	(24.859.810.354,00)	(4.973,04)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(208.399.005.918,00)	(157.489.498.012,00)	(50.909.507.906,00)	32,33

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp444.260.237.964,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp208.399.005.918,00 kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00; Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp30.600.039.727,00 dengan rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp30.600.039.727,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp202.812.490.797,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp469.273.762.570,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	(%)
Ekuitas Awal	444.260.237.964,00	422.111.094.833,00	22.149.143.131,00	5,25
Surplus / Defisit-LO	(208.399.005.918,00)	(157.489.498.012,00)	(50.909.507.906,00)	32,33
Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	30.600.039.727,00	(23.209.069.399,00)	53.809.109.126,00	(231,85)
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	30.600.039.727,00	(23.195.924.560,00)	53.795.964.287,00	(231,92)
Lain-lain	0,00	(13.144.839,00)	13.144.839,00	(100,00)
Transaksi Antar Entitas	202.812.490.797,00	202.847.710.542,00	(35.219.745,00)	(0,02)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	25.013.524.606,00	22.149.143.131,00	2.864.381.475,00	12,93
Ekuitas Akhir	469.273.762.570,00	444.260.237.964,00	25.013.524.606,00	5,63

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2018		Thd Angg (%)	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	13.475.086.000,00	11.663.284.224,00	86,55	10.731.461.038,00
JUMLAH PENDAPATAN		13.475.086.000,00	11.663.284.224,00	86,55	10.731.461.038,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	84.287.121.000,00	84.018.523.695,00	99,68	69.787.192.114,00
Belanja Barang	B.4	89.055.692.000,00	83.934.300.921,00	94,25	102.344.644.721,00
Belanja Modal	B.5	22.171.202.000,00	21.904.876.405,00	98,80	39.337.028.582,00
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		195.514.015.000,00	189.857.701.021,00	97,11	211.468.865.417,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	33.049.600,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0,00	0,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.5	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR	C.8	0,00	0,00
Persediaan	C.9	2.268.275.397,00	1.385.672.418,00
Jumlah Aset Lancar		2.268.275.397,00	1.418.722.018,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.10	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.11	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	C.12	216.312.132.396,00	216.312.132.396,00
Peralatan dan Mesin	C.13	196.135.354.724,00	195.093.264.253,00
Gedung dan Bangunan	C.14	232.559.835.154,00	233.874.874.154,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.15	11.741.372.797,00	11.543.273.797,00
Aset Tetap Lainnya	C.16	15.627.955.878,00	15.346.484.496,00
Konstruksi dalam pengerjaan	C.17	28.583.355.350,00	12.468.732.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	(234.088.461.227,00)	(243.878.533.963,00)
Jumlah Aset Tetap		466.871.545.072,00	440.760.227.333,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	11.520.424.655,00	11.164.778.155,00
Aset Lain-Lain	C.20	7.254.929.769,00	4.764.944.283,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.21	(16.182.419.882,00)	(13.265.891.166,00)
Jumlah Aset Lainnya		2.592.934.542,00	2.663.831.272,00
JUMLAH ASET		471.732.755.011,00	444.842.780.623,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	2.458.992.441,00	549.493.059,00
Uang Muka dari KPPN	C.23	0,00	33.049.600,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.24	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.458.992.441,00	582.542.659,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.458.992.441,00	582.542.659,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.25	469.273.762.570,00	444.260.237.964,00
JUMLAH EKUITAS		469.273.762.570,00	444.260.237.964,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		471.732.755.011,00	444.842.780.623,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	11.385.593.550,00	34.476.486.575,00
JUMLAH PENDAPATAN		11.385.593.550,00	34.476.486.575,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	85.876.547.475,00	69.781.238.027,00
Beban Persediaan	D.3	2.989.890.272,00	3.799.699.418,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	40.802.730.838,00	46.654.379.717,00
Beban Pemeliharaan	D.5	8.260.737.266,00	5.670.365.825,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	28.091.128.769,00	45.488.955.169,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.629.172.965,00	13.924.938,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	26.774.472.769,00	21.057.312.733,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		195.424.680.354,00	192.465.875.827,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(184.039.086.804,00)	(157.989.389.252,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1	(18.894.174,00)	298.556.789,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.1	8.000.000,00	298.556.789,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.1.2	26.894.174,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang	D.11.2	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang	D.11.2.1	0,00	0,00
Beban Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang	D.11.2.2	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pelepasan Keg. Non Operasional Lainnya	D.11.2	(24.341.024.940,00)	201.334.451,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.2.1	276.345.764,00	207.747.531,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.2.2	24.617.370.704,00	6.413.080,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(24.359.919.114,00)	499.891.240,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(208.399.005.918,00)	(157.489.498.012,00)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(208.399.005.918,00)	(157.489.498.012,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	444.260.237.964,00	422.111.094.833,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(208.399.005.918,00)	(157.489.498.012,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.4	30.600.039.727,00	(23.209.069.399,00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	30.600.039.727,00	(23.195.924.560,00)
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0,00	(13.144.839,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	202.812.490.797,00	202.847.710.542,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		25.013.524.606,00	22.149.143.131,00
EKUITAS AKHIR	E.6	469.273.762.570,00	444.260.237.964,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Arsip Nasional Republik Indonesia

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

Sejarah Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia

Landarchief (1892- 1942)

Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Landarchief*. Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan *Landarchivaris* yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun *Landarchivaris* pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1922 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat *Landarchivaris* yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, *Lansarchief* mendapat tugas khusus, yaitu: ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Arschief Ordonantie* yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain :

1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah;
2. Batas arsip baru adalah 40 tahun;
3. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada *Algemeen Landarchief* di Batavia (Jakarta).

Kobunsjokan (1942-1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama *Landarchief*, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah *Kobunsjokan* yang ditempatkan dibawah *Bunkyokyoku*. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai *Landarchief* pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi *Landarchief* sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan.

Arsip Negeri (1945-1947)

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (*Landarchief*) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (*Landarchief*) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

Landsarchief (1947-1949)

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi *Landsarchief* kembali. Sebagai pimpinan *Landsarchief* adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik

Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia.

Arsip Negara (1950-1959)

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun 1945-1947, *Landsarchief* ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan *Landsarchief* oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959.

Arsip Nasional (1959-1967)

Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K (1959-1961)

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Negara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957.

Berdasarkan SK menteri PP dan K Nomor 69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962)

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus (1963-1964)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1964-1966)

Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Dibawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 1961.

Arsip Nasional dibawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik (1966-1967)

Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Arsip Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RI bidang Lembaga-lembaga Politik. Namun secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.

Arsip Nasional RI (1967- sekarang)

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara anggaran pembelanjannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS Nomor A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI;
2. Mengajukan usulan perubahan Perpres Nomor 19/1961 menjadi Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kearsipan.

Usulan-usulan tersebut hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali (1970) belum terlaksana. Oleh karena itu Dra. Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional, berjuang untuk melanjutkan cita-cita pemimpin sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, serta atas dukungan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 19 ayat (1) ANRI adalah lembaga kearsipan nasional yang wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

VISI ANRI

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional 2000-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2015-2019 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019, yaitu: **“Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif Bangsa”**

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah

“Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025”.

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MISI ANRI

Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 **“Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif bangsa”** ditempuh melalui 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi *electronic records system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ANRI. Karena itu, ada 6 (enam) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi **“Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan**

Integrasi Memori Kolektif Bangsa". ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat pengelolaan arsip yang andal dapat meningkatkan pemanfaatan arsip. Selain itu, hasil *think tank*, diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai *think tank* dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2000-2025 yaitu :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut :

1. Integritas;
2. Profesional;
3. Visioner;
4. Sinergi;
5. Akuntabel.

TUJUAN ANRI

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional (T1);
2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional (T2);
3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (T3);
4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional (T4).

Keempat tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka

harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

STRATEGI PEMBANGUNAN KEARSIPAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, disusun strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pencapaian Tujuan 1 Sasaran 1 (T1S1)

Untuk mencapai T1S1 yaitu terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif serta peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang disupervisi;
- c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa;

- d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM kearsipan;
- e) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah (a) meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 2 (T2S2)

Untuk mencapai T2S2 yaitu terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- b) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;
- c) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya *server storage* arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai guna arsip yang terkandung didalamnya;

- d) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas layanan kearsipan.

3. Strategi Pencapaian Tujuan 3 Sasaran 3 (T3S3)

Untuk mencapai T3S3 yaitu terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;
- c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
- d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;
- e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;
- f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

4. Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 4 (T4S4)

Untuk mencapai T4S4 mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
- c) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;
- d) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
- e) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
- f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;
- g) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan secara terus menerus pada instansi pemerintah dan swasta;
- h) Meningkatkan kualitas Pusat Jasa Kearsipan dalam pembenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta;
- i) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai T4S4 yaitu terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengawasan internal terutama dalam reviu perencanaan, pengelolaan anggaran dan BMN;
2. Peningkatan pemahaman unit kerja dalam pengelolaan anggaran.

Pencapaian sasaran tersebut diatas dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga ANRI. Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.

5. Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 5 (T4S5)

Untuk mencapai T4S5 yaitu terwujudnya manajemen internal yang akuntabel, ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a) Peningkatan pemahaman unit kerja tentang SAKIP;
- b) Peningkatan kemampuan unit kerja tentang penyusunan dokumen perencanaan dan LAKIP;
- c) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI. Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ANRI. Sasaran program ini adalah meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

KERANGKA REGULASI

Di sini peran ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota maupun di unit kearsipan kementerian/lembaga serta melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/lembaga. Namun pembinaan kearsipan masih kurang efektif, karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan. Masih terdapat ketidakselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 145 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

kearsipan;

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- f. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan sumber daya manusia kearsipan.
2. Terwujudnya pelindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman pelindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria tanggung jawab; dan strategi pelindungan dan penyelamatan arsip.
3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektifitas NSPK sistem kearsipan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD serta semua pihak terkait.
4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi

yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

KERANGKA KELEMBAGAAN

a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, organisasi dan tata kerja ANRI telah mengalami perubahan dua kali dan terakhir dicabut dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum mendapat perhatian yang proposional dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang belum mempunyai unit kearsipan.

b. Ketatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai buktipertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan

- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum,

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
 - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Sedangkan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- c. Pelaksanaan pengolahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- d. Pelaksanaan preservasi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami;
- e. Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah seluruh Indonesia dan arsip tsunami; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perencanaan program dan anggaran serta pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem

Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat. Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu :

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI. Sekretariat Utama terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Biro Umum.
2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas :
 - a. Direktorat Kearsipan Pusat;
 - b. Direktorat Kearsipan Daerah I;
 - c. Direktorat Kearsipan Daerah II;
 - d. Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi.
3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional. Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas :
 - a. Direktorat Akuisisi;
 - b. Direktorat Pengolahan;
 - c. Direktorat Preservasi;
 - d. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan.
4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari :
 - a. Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - b. Pusat Data dan Informasi;
 - c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Selain itu terdapat empat unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, Inspektorat, dan Pusat Akreditasi Kearsipan dengan tugas sebagai berikut:

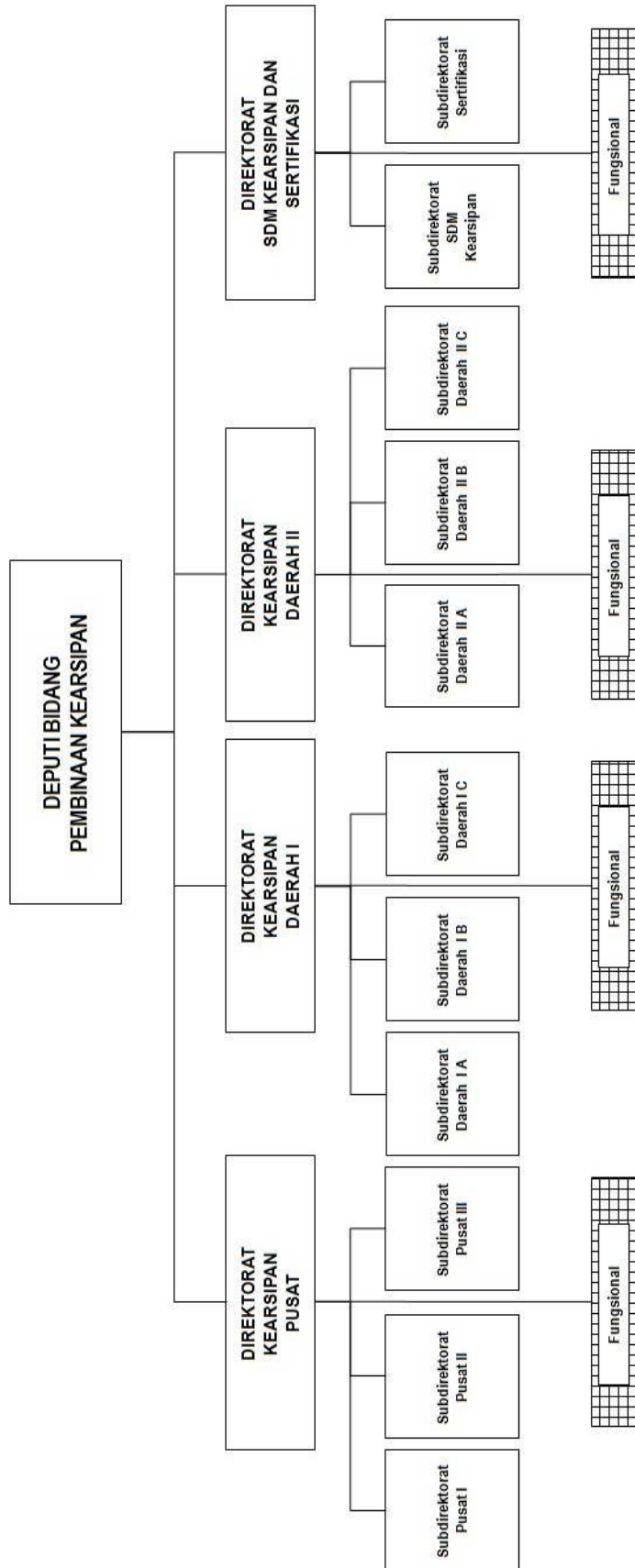
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan;
2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan;
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI;
4. Pusat Akreditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akreditasi kearsipan.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan ANRI posisi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

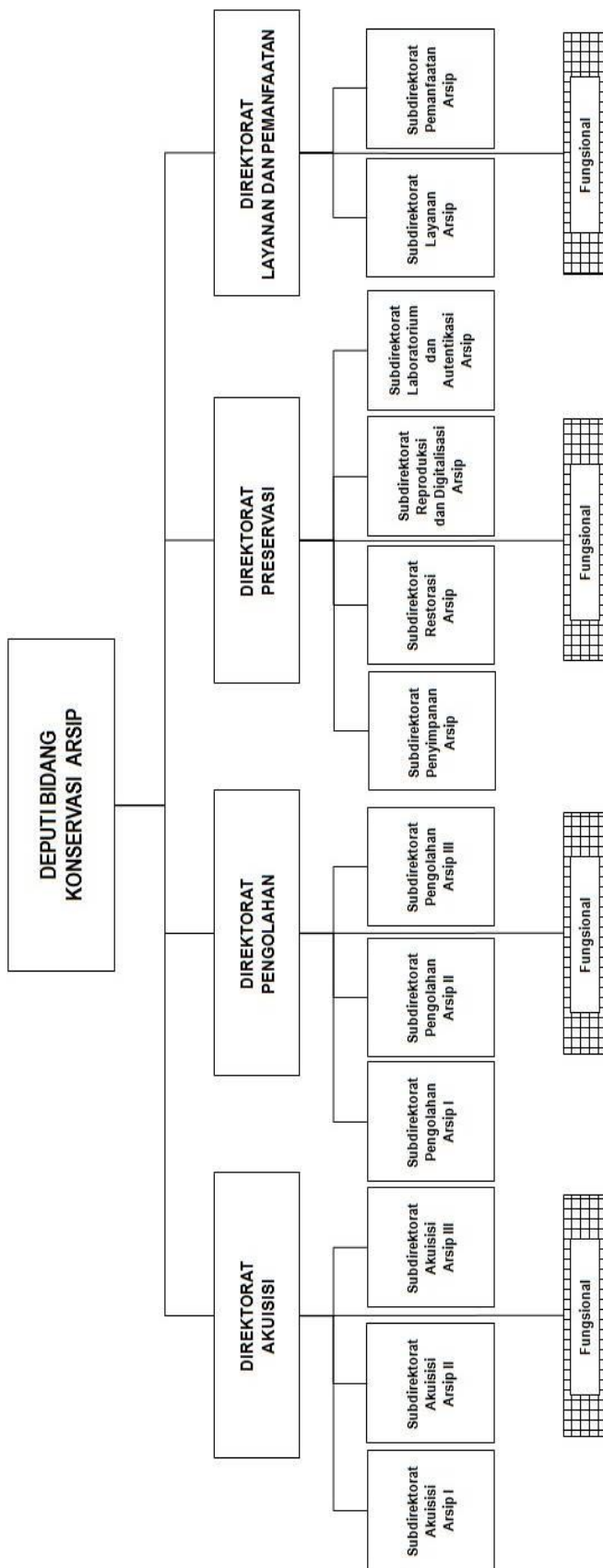
	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan, MPA
	<ul style="list-style-type: none">• Sekretaris Utama Drs. Sumrahadi, MIMS
	<ul style="list-style-type: none">• Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Dr. Andi Kasman M, S.E., M.M.
	<ul style="list-style-type: none">• Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK) Drs. Imam Gunarto, M.Hum
	<ul style="list-style-type: none">• Deputi Bidang Konservasi Arsip Dr. M. Taufik, M.Si

Sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia bahwa struktur organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

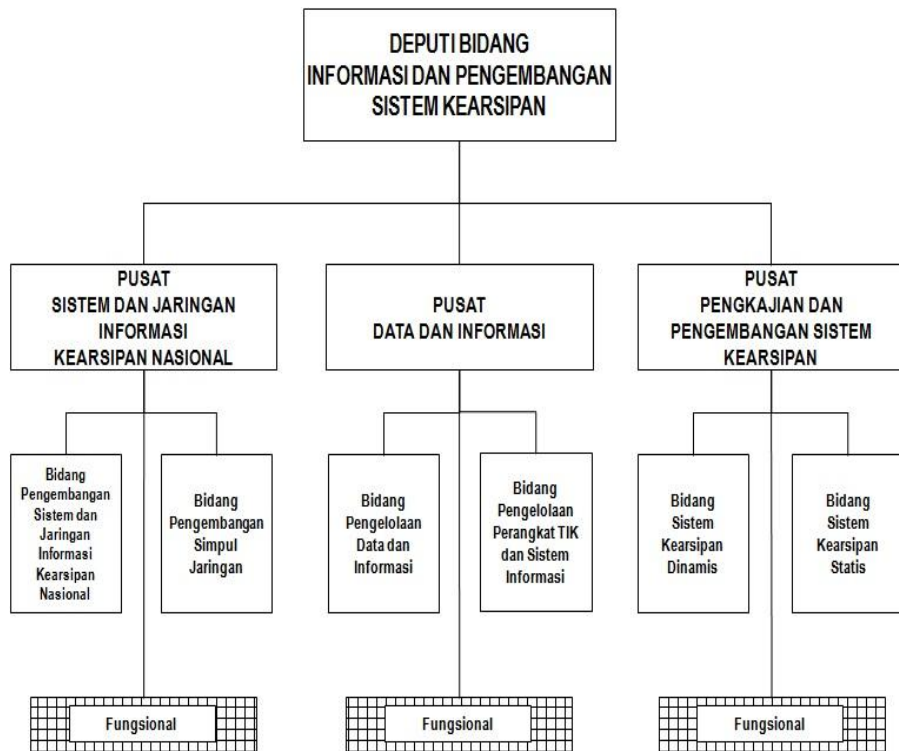
B. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN



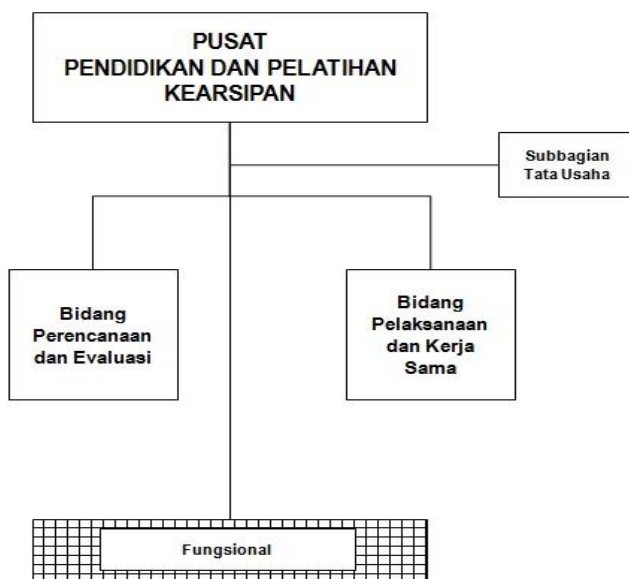
C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP



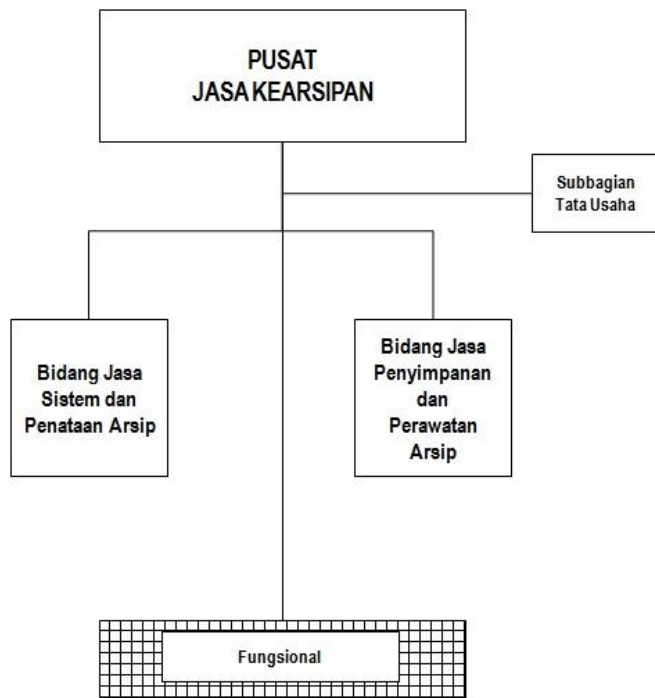
D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN



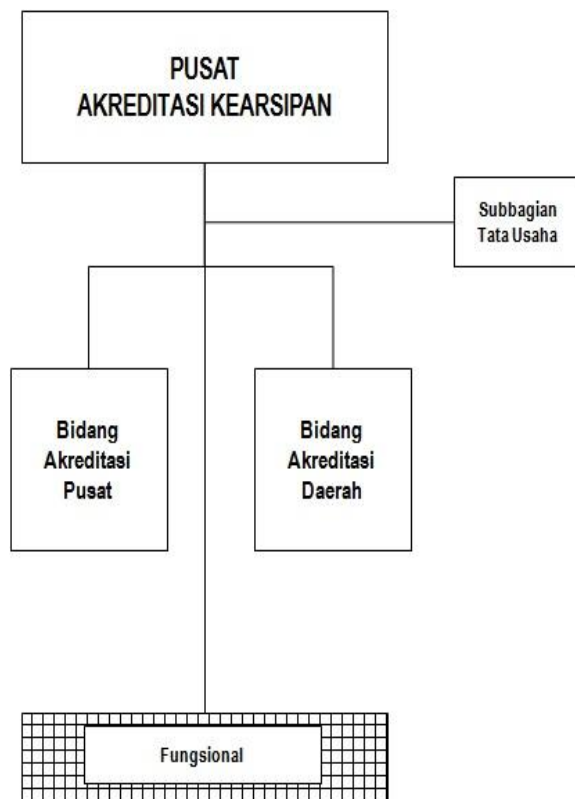
E. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN



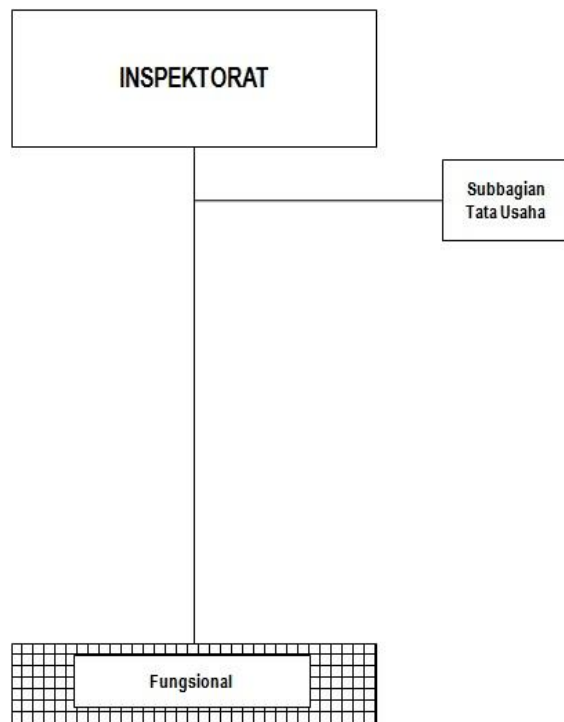
F. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT JASA KEARSIPAN



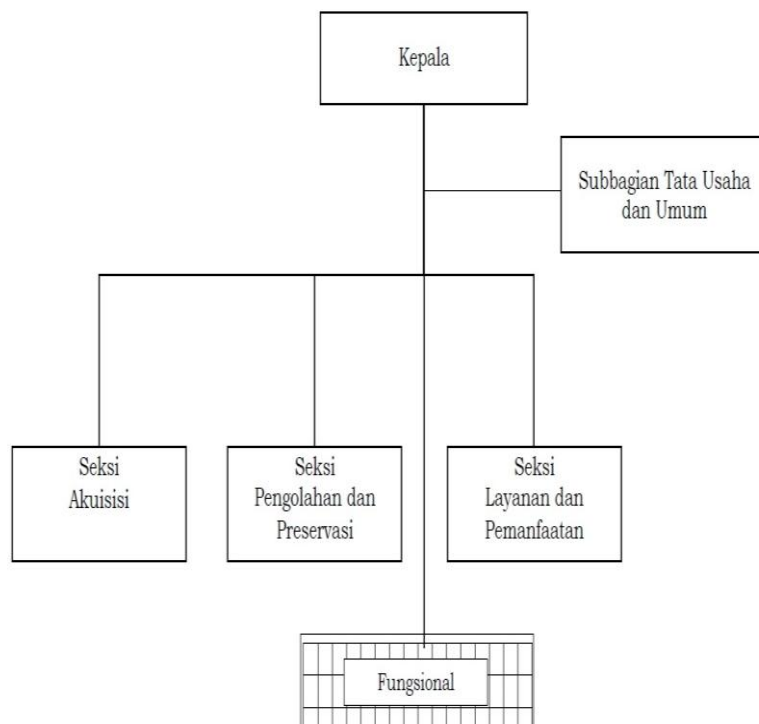
G. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN



H. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



I. STRUKTUR ORGANISASI BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI ACEH



Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI posisi per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 574 orang. Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan sebagai berikut :

Pegawai ANRI Menurut Penempatan

NO	PENEMPATAN	JUMLAH	%
1.	PNS ANRI PUSAT	476	82,93
2.	PNS ANRI BOGOR	25	4,36
3.	PNS ANRI GAJAH MADA	1	0,17
4.	Balai Arsip Statis Tsunami Aceh	8	1,39
5.	PNS ANRI yang dipekerjakan di luar ANRI	9	1,57
6.	CPNS	55	9,58
TOTAL		574	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1.	Jabatan Struktural	98	17,07
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	302	52,62
3.	Jabatan Fungsional Umum	119	20,73
4.	CPNS	55	9,58
TOTAL		574	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	301	52,44
2.	Perempuan	273	47,56
TOTAL		574	100,00

Pegawai ANRI Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	DOKTORAL (S3)	5	0,87
2.	PASCA SARJANA (S2)	120	20,91
3.	SARJANA (S-1)	269	46,86
4.	DIPLOMA IV	22	3,83
5.	DIPLOMA III	96	16,73
6.	DIPLOMA II	1	0,17
7.	SLTA	61	10,63
TOTAL		574	100,00

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir.

Pendekatan

Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun jumlah Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dilingkup ANRI adalah 37 (tiga puluh tujuh) satker yang terdiri atas 3 (tiga) satker Kantor Pusat/KP, 1 (satu) satker Kantor Daerah/KD dan 33 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi/DK.

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

Kode BA	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
087	01	Arsip Nasional RI	3	1	33	-	37
Jumlah			3	1	33	-	37

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Arsip Nasional Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia berupa penerimaan yang berasal dari :

- a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang bersifat umum meliputi :
 - 1) Penerimaan Kembali Belanja yang berasal dari pengembalian belanja (pegawai, barang dan modal) dari tahun anggaran yang lalu;
 - 2) Jasa Giro yang berasal dari jasa lembaga keuangan (perbankan) pada tahun berjalan;
 - 3) Hasil penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak maupun dihapuskan dengan cara dijual melalui lelang;
 - 4) Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (TP/TGR) yang berasal dari kewajiban oleh Bendahara maupun pegawai yang ditetapkan berdasarkan SK Penetapan.

- b) Penerimaan dari kegiatan pelayanan ANRI yang bersifat Fungsional pada:
- 1) Pusat Jasa Kearsipan menyelenggarakan pemberian jasa berupa:
 - 1.1. Jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system,encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media;
 - 1.2. Jasa Konsultansi/tenaga Ahli Kearsipan meliputi penataan kearsipan, layanan penataan *record centre* pusat dan pembuatan pedoman manual kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
 - 1.3. Jasa Penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di *Record* Arsip.
 - 2) Direktorat Pemanfaatan memberikan layanan jasa berupa:
 - 2.1 Jasa penggandaan dan alih media meliputi *foto copy* arsip, foto copy referensi/Buku, Foto, *Print Out* mikrofilm ukuran A4, film, *scanning* arsip, alih media arsip kertas ke mikrofilm, reproduksi rekaman suara;
 - 2.2 Naskah Sumber Arsip dan sumber-sumber Sejarah meliputi penerbitan naskah sumber periode sebelum Republik Indonesia (VOC-Belanda), Penerbitan Naskah Sumber Periode Republik Indonesia (1945-sekarang), bentuk elektronik;
 - 2.3 Jasa Konsultasi/tenaga Ahli Kearsipan berupa penelusuran arsip dan penggandaan arsip.
 - 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang memberikan layanan jasa berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan meliputi diklat fungsional arsiparis dan diklat teknis kearsipan.
 - 4) Biro Umum yang menyediakan layanan berupa jasa sewa ruangan pusklat dan jasa sewa gedung Gajah Mada.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari:

2.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan yang diperoleh ANRI berasal dari kelompok PNBP Lainnya antara lain :

- a) Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN (pemanfaatan) dan Iuran Badan (4251). Tahun Anggaran 2018 ANRI diperoleh pendapatan yang berasal dari :
 - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119) yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi pada direktorat pemanfaatan;
 - Pendapatan dari sewa Tanah, Gedung dan Bagunan (425131) yang diperoleh dari persewaan gedung Arsip Gajah Mada yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi Biro Umum dan persewaan gedung dan kamar Pusdiklat Kearsipan Bogor.
- b) Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254), pendapatan ini berasal dari Satker Pusdiklat Kearsipan ANRI Bogor yang menjalankan tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) merupakan jasa tenaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan kepada pengguna/konsumen.
- c) Pendapatan Jasa Lainnya (4256) dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi, ANRI merupakan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL (425692) yang diberikan oleh Pusat Jasa Kearsipan kepada pengguna/konsumen berupa jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system, encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media, jasa penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di *Record* Arsip dan Direktorat Pemanfaatan dan Layanan Kearsipan berupa Jasa Penggandaan, Fotocopy dan Transkripsi.
- d) Pendapatan Denda (4258) dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) merupakan pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah yang biasa (umum) ada pada semua Kementerian/Lembaga.

2.2 Pendapatan Non Operasional

- a) Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) merupakan pendapatan hasil penjualan lelang Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- b) Pendapatan lain-lain (4259) yang berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (425911), penerimaan kembali belanja barang TAYL (425912) dan penerimaan kembali belanja modal TAYL (425913).

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja yakni belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53). Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja meliputi :
 - a) Beban Operasional yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi serta beban penyisihan piutang tak tertagih;
 - b) Beban Non Operasional meliputi beban pelepasan aset non lancar dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
- Selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

5.1 Aset Lancar

- a. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- b. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

5.2 Aset Tetap

- a. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- b. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya;
- d. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

5.3 Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

5.4 Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- b. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

5.5 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- b. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- c. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- d. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
- e. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2017 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tetap tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat disajikan sebagai berikut :

Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan

Rp11.663.284.224,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.663.284.224,00 atau mencapai 86,55 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp13.475.086.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2018		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.596.446.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan luran Badan	1.215.000.000,00	1.786.884.000,00	147,07
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	0,00	1.881.372.800,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	10.648.040.000,00	7.661.138.350,00	71,95
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Penyelesaian Ganti Rugi	5.600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	64.198.400,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	269.690.674,00	2.696,91
Jumlah	13.475.086.000,00	11.663.284.224,00	86,55

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 untuk Pendapatan Jasa Layanan Umum belum ada realisasi dari estimasinya. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) dan luran Badan mencapai 147,07 persen dari estimasinya. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi belum tercatat estimasi sehingga belum terukur terhadap realisasi pendapatannya. Pendapatan Jasa Lainnya mencapai 71,95 persen dari estimasinya. Pendapatan lain-lain realisasinya melebihi dari estimasi pendapatan mencapai 2.696,91 persen. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan terdapat kenaikan sebesar 8,68 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN		NAIK/TURUN	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan luran Badan	1.786.884.000,00	2.208.419.789,00	(421.535.789)	(19,09)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.881.372.800,00	1.783.717.300,00	97.655.500	5,47
Pendapatan Jasa Lainnya	7.661.138.350,00	6.186.102.800,00	1.475.035.550	23,84
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Penyelesaian Ganti Rugi	0,00	78.695.475,00	(78.695.475)	(100,00)
Pendapatan Denda	64.198.400,00	21.054.000,00	43.144.400	204,92
Pendapatan Lain-lain	269.690.674,00	453.471.674,00	(183.781.000)	(40,53)
Jumlah	11.663.284.224,00	10.731.461.038,00	931.823.186	8,68

B.1.1 Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan BLU bagi BLU Penyedia Barang dan Jasa dari hasil pelayanan jasa yang merupakan *core bussiness*-nya. Kegiatan Jasa layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya. Terdapat kesalahan estimasi pendapatan pada satker Pusdiklat Kearsipan Bogor yang seharusnya jenis Pendapatan Jasa Layanan Umum ini tidak ada.

B.1.2 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	14.380.000,00	0,00	14.380.000,00	0,00
ANRI Jakarta	14.380.000,00	0,00	14.380.000,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	8.000.000,00	298.556.789,00	(290.556.789,00)	(97,32)
ANRI Jakarta	8.000.000,00	298.556.789,00	(290.556.789,00)	(97,32)
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan	1.406.904.000,00	1.909.863.000,00	(502.959.000,00)	(26,33)
ANRI Jakarta	1.406.904.000,00	1.579.463.000,00	(172.559.000,00)	(10,93)
Pusdiklat Kearsipan Bogor	0,00	330.400.000,00	(330.400.000,00)	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	357.600.000,00	0,00	357.600.000,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor	357.600.000,00	0,00	357.600.000,00	0,00
Jumlah	1.786.884.000,00	2.208.419.789,00	(421.535.789,00)	(19,09)

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan), Pendapatan dari Penjualan serta pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.786.884.000,00 atau 147,07 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp1.215.000.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp421.535.789,00 atau 19,09 persen. Adapun rincian realisasi tersebut sebagai berikut :

1. Adanya Pendapatan Penjualan Hasil Produksi non Litbang Lainnya sebesar Rp14.380.000,00 yang berasal dari Penjualan hasil penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum RI (VOC-Belanda) dan Periode RI (1945-Sekarang);
2. Terdapat penurunan 97,32 persen realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya dibanding TA sebelumnya yang berasal dari penurunan proses lelang Barang Milik Negara ANRI Jakarta;

3. Penurunan 26,33 persen Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dibanding TA sebelumnya yang berasal dari pengguna sewa Gedung Gajah Mada, dan sewa kamar Pusdiklat Kearsipan;
4. Adanya Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp357.600.000,00 yang berasal dari kegiatan penggunaan kamar dan fasilitas diklat pada Satker Pusdiklat Kearsipan Bogor.

B.1.3 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi adalah sebesar Rp1.881.372.800,00 atau 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp1.783.717.300,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp97.655.500,00 atau 5,47 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya pelaksanaan diklat PNBK pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Bogor.

B.1.4 Pendapatan Jasa Lainnya

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Jasa Tebaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi	7.661.138.350,00	6.186.102.800,00	1.475.035.550,00	23,84
Arsip Nasional RI Jakarta	338.793.300,00	397.061.800,00	(58.268.500,00)	(14,67)
BAST Aceh	153.000,00	7.057.500,00	(6.904.500,00)	(97,83)
Pusat Jasa Kearsipan	7.322.192.050,00	5.781.983.500,00	1.540.208.550,00	26,64
Jumlah	7.661.138.350,00	6.186.102.800,00	1.475.035.550,00	23,84

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya adalah sebesar Rp7.661.183.350,00 atau 71,95 persen dari estimasi sebesar Rp10.648.040.000,00. Bila dibandingkan dengan TA 2017 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp1.475.035.550,00 atau 23,84 persen. Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari Jasa Penggandaan, Reproduksi dan Transkripsi pada Kantor Pusat ANRI Jakarta dan Balai Arsip Statis Tsunami Aceh. Jasa Penyimpanan, Pemeliharaan, Perawatan, dan pembenahan Arsip serta Jasa Pembuatan Pedoman dan Pembuatan Sistem Aplikasi Kearsipan pada Pusat Jasa Kearsipan.

B.1.5 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Bank dan Penyelesaian Ganti

Kerugian Negara Terhadap Pegawai

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	275.475,00	(275.475,00)	(100,00)
Pusdiklat Kearsipan Bogor	0,00	80.715,00	(80.715,00)	(100,00)
Pusat Jasa Kearsipan	0,00	174.229,00	(174.229,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi	0,00	20.531,00	(20.531,00)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	78.420.000,00	(78.420.000,00)	(100,00)
ANRI Jakarta	0,00	78.420.000,00	(78.420.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	78.695.475,00	(78.695.475,00)	(100,00)

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Bank dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari estimasi sebesar Rp5.600.000,00. Bila dibandingkan dengan TA 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp78.695.475,00 atau 100,00 persen.

B.1.6 Pendapatan Denda

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	64.198.400,00	21.054.000,00	43.144.400,00	204,92
ANRI Jakarta	64.198.400,00	21.054.000,00	43.144.400,00	204,92
Jumlah	64.198.400,00	21.054.000,00	43.144.400,00	204,92

Realisasi Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah adalah sebesar Rp64.198.400,00. Pendapatan denda berasal dari satker ANRI Jakarta atas kegiatan pekerjaan Pembangunan E-Depot di ANRI TA 2017 oleh PT Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 60110418000079. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 204,92 persen karena pada TA 2017 tidak terdapat denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

B.1.7 Pendapatan Lain-lain

Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	107.341.050,00	112.686.582,00	(5.345.532,00)	(4,74)
ANRI Jakarta	107.341.050,00	112.686.582,00	(5.345.532,00)	(4,74)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	156.120.724,00	340.785.092,00	(184.664.368,00)	(54,19)
ANRI Jakarta	154.410.719,00	334.646.952,00	(180.236.233,00)	(53,86)
Pusdiklat Kearsipan Bogor	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
Pusat Jasa Kearsipan	1.000.005,00	0,00	1.000.005,00	0,00
Balai Arsip Tsunami Aceh	0,00	887.140,00	(887.140,00)	(100,00)
BPAD Provinsi Aceh	0,00	5.251.000,00	(5.251.000,00)	(100,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	6.228.900,00	0,00	6.228.900,00	0,00
ANRI Jakarta	6.228.900,00	0,00	6.228.900,00	0,00
Jumlah	269.690.674,00	453.471.674,00	(183.781.000,00)	(40,53)

Realisasi Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp269.690.674,00 atau 2.696,91 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp10.000.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp183.781.000,00 atau 40,53 persen. Hal ini disebabkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan pada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	20/04/2018	Pengembalian kelebihan pembayaran uang makan pegawai ANRI Tahun 2017	174D24F3ADF16O28	425911	84.825.200,00
2	23/04/2018	Pengembalian kelebihan uang makan pegawai ANRI Tahun 2017	2D17D7D0IFUTLSBP	425912	9.992.800,00
3	24/04/2018	Pengembalian kelebihan uang makan pegawai ANRI Tahun 2017	53BD88502B4N2H49	425911	12.523.050,00
Jumlah					107.341.050,00

- 2) Penurunan pada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	03/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Kalimantan Barat tgl. 27-29 Desember 2017 a.n. Dra. Multi Siswati, dkk (3 Org)	090114NOQUJHGBP	425912	3.047.700,00
2	03/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Sumatera Barat tgl. 1-6 Oktober 2017 a.n. Nurarta Sitomurang	90B2C4NPULEDOCBP	425912	1.843.300,00
3	04/01/2018	Pengembalian uang harian perjalanan dinas Rapat Diluar Kantor di Banten tgl. 27 November 2017 a.n. Lisa Nurlaila Ningsih	754465AHJD1K2249	425912	150.000,00
4	05/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Bali tgl. 15-17 Mei 2017 a.n. Desi Pratiwi, dkk (4 Org)	FB74D6FIL3NKRLSP	425912	747.616,00
5	05/01/2018	Pengembalian Perjadin ke Palangkaraya a.n. Binner S. TA 2017	2A76B60CBS5TBPSI	425912	270.000,00
6	08/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Sulawesi Selatan tgl. 13-15 Desember 2017 a.n. Nanik Kurniawati, dkk (2 Org)	95D98GRV0IM0T69	425912	7.200,00
7	09/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Belitung Timur tgl. 29/11/2017 - 01/12/2017 a.n. Nurarta Sitomurang	B59A21OIS3DNI0UP	425912	2.171.000,00
8	09/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Belitung Timur tgl. 29/11/2017 - 01/12/2017 a.n. Abdul Cholik	D11FA1OHG547B1UP	425912	112.000,00
9	09/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Kaltara tgl. 6-9 Desember 2017 a.n. Lili Hudiyanto, dkk (2 Org)	B60D81OHG547B1UP	425912	150.000,00
10	10/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta SPM No. 03857	5CB873EVK86NM0N9	425912	550.000,00
11	10/01/2018	Pengembalian Honor Tim Penyusun PERKA ANRI Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset a.n. Mustari Irawan dan Andi Kasman SPM No. 03433	8BD503F148SI9TN9	425912	1.232.500,00
12	10/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta tgl. 8-9 November 2017 a.n. Imam Taufik Gumilar SPM No. 02920	46AE83F0DIEOAVN9	425912	38.000,00
13	11/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya akomodasi kegiatan verifikasi lapangan pemilihan LKD Terbaik	2B86E5D70HHN5TFP	425912	64.000,00
14	11/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan ke Purwokerto tgl. 12-14 2017 a.n. Sulistiyowati	8E8EBF5D8POA7BFFP	425912	35.500,00
15	11/01/2018	Pengembalian transport rapat koordinasi implementasi SIKD tgl. 21/02/2017 a.n. Een Herdiani, dkk (2 Org)	B762A5DCKVO3U9FP	425912	560.000,00
16	12/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Tanjung Selor Kaltara tgl. 19-23 April 2017 a.n. Beni Octaviato, dkk (3 Org)	591A987HG9OICK88	425912	1.770.200,00
17	12/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya transport koordinasi e-arsip tgl. 4-14 Desember 2017 a.n. Bamdor Sumardiyono, dkk (10 Org)	F3B12872OQAU088	425912	600.000,00

18	16/01/2018	Pengembalian kelebihan honor narasumber rakor penyelamatan arsip penyiaran tanggal 02/08/2017 a.n. Tato Pujiarto	BB1B54B3KQCTOPA9	425912	85.000,00
19	16/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas sebagai mentor dlm rangka Diklat PIM IV ke Bogor tgl. 15/12/2017	A6E5D4B50OMDVOA9	425912	280.000,00
20	17/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas ke NTT dlm rangka verifikasi lapangan pemilihan LKD Teladan a.n. Achmad Sabiqun Nahar	7263167N8Q5NTJ2P	425912	178.800,00
21	17/01/2018	Pengembalian kelebihan honor pengelola APBN bln Januari s.d. Juni 2017 a.n. Wijiyanto	510B267JAG7LCH2P	425912	13.060.000,00
22	18/01/2018	Pengembalian Perjadin ke Sintang a.n. Binner Sitompul TA 2017	68A445I0B9NR9NMR2	425912	440.000,00
23	22/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas dalam rangka rapat konsinyering ke Bogor tanggal 4-5 Mei 2017 a.n. Kismadi	1AB102MJ1S1NST9	425912	600.000,00
24	22/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas dlm rangka rapat konsinyering ke Bogor tgl. 4-5 Mei 2017 a.n. Heni Soraya	C9A812MKDQT1URT9	425912	600.000,00
25	29/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas dlm rangka rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan kerjasama tgl. 12/12/2017 a.n. Tonny Agung A.A., dkk (6 Org)	5AD20PJEA045R8P	425912	1.680.000,00
26	30/01/2018	Pengembalian biaya perjalanan dinas dlm rangka menghadiri peresmian museum BPKRI ke Magelang tgl. 8-9 Januari 2017 a.n. M. Taufik	9C6F826MAUKHLT19	425912	263.000,00
27	02/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas luar negeri ke Georgia tgl. 24-29 Oktober 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk (2 Org)	D9473CQDO4CBC59	425912	1.807.500,00
28	06/02/2018	Pengembalian Honor Administrator Pengguna SIRUP bln Januari - Desember 2017 a.n. Ratna Herwina	021DE042BPEJ2U79	425912	6.000.000,00
29	08/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas Luar Negeri ke Amerika Serikat tgl. 25-29 Juli 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk (5 Org)	229223807H1JFPO9	425912	8.990.800,00
30	09/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Bogor tgl. 31/03 - 01/04 2017 dlm rangka evaluasi penerbitan majalah arsip a.n. Syaifudin, dkk (18 Org)	A86124BKQKQBKAGP	425912	10.080.000,00
31	14/02/2018	Pengembalian Honor Narasumber Workshop Pengelolaan Jurnal Kearsipan Online Tahun 2017 an. M. Furqon	23F3922BQE6S33B9	425912	190.000,00
32	19/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Belitung Timur tgl. 11/05/2017 dlm rangka persiapan pameran arsip wawasan kebangsaan a.n. Cristine Dian Enawati	E66A26B507CMK95P	425912	144.000,00
33	01/03/2018	Pengembalian honor tim penyusun dan perumus PP tentang tarif PNBP di lingkungan ANRI bln Mei 2017 s.n. Imam M.	1A44171BPMPOEHUO	425912	425.000,00
34	04/04/2018	Pengembalian honor tim Diorama Arsip Kepresidenan Gd. Gajah Mada Tahun 2017 a.n. Neneng Ridayanti, dkk (6 Org)	1C51036PPR2893Q9	425912	6.384.000,00
35	11/04/2018	Pengembalian Perjalanan Dinas ke LN Australia TA 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk	5938F7BOSMBJ4K5O	425912	1.000.005,00
36	19/04/2018	Pengembalian honor tim penyusun rencana anggaran ANRI bln Desember 2017	E297949GHOMHI69P	425912	250.000,00
37	19/04/2018	Pengembalian pembayaran perjadin ke LN Washington USA Tahun 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk	73A6F49HVES67R9P	425912	15.000.000,00
38	19/04/2018	Pengembalian uang representatif perjadin LN Yordania Tahun 2017	6775349P00COT19P	425912	750.000,00
39	19/04/2018	Pengembalian tiket perjadin LN ke Belanda Tahun 2017	11CE449QC2VK5U9P	425912	6.072.000,00
40	19/04/2018	Pengembalian tiket perjadin LN ke Belanda Tahun 2017 a.n. Diantyo N, dkk (2 Org)	83CC549SNODLD29P	425912	1.468.907,00
41	19/04/2018	Pengembalian honorarium Tim Pelaksana kegiatan Tahun 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk	6500849RK86QNO9P	425912	31.739.000,00
42	23/04/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjadin ke luar negeri ke Beijing Tahun 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk	0AFC37CUORUAH6BP	425912	12.861.946,00
43	23/04/2018	Pengembalian Honorarium Tim Peleksana kegiatan di ANRI Tahun 2017 a.n. M. Taufik	27E747CTF8508FBP	425912	4.462.500,00
44	23/04/2018	Pengembalian/Refund tiket perjadin tahun 2017 ke Luar Negeri Washington DC USA a.n. Edi Saptono	A28A47CVQAV001BP	425912	14.812.050,00
45	23/04/2018	Pengembalian kelebihan Honorarium kegiatan ANRI TA 2017 a.n. Widarno, dkk (3 Org)	DBBB37D1CM50I6BP	425912	2.396.000,00
46	23/04/2018	Pengembalian uang representatif an. Multi Siswati	DC2FF7D24HQTG8BP	425912	750.000,00
47	24/04/2018	Pengembalian perjadin ke LN Belanda a.n. Diantyo Nugroho, dkk (2 Org) TA 2017	C3B4868L6K08JC48	425912	1.200,00
Jumlah					156.120.724,00

3) Terdapat Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.228.900,00 yang berasal dari PT. Taspem bulan Oktober 2018 pada Satker ANRI Jakarta.

Realisasi Belanja

Rp189.857.701.021,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Negara (netto) sebesar Rp189.857.701.021,00 atau mencapai 97,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp195.514.015.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Pegawai	84.287.121.000,00	84.103.692.174,00	99,78
Belanja Barang	89.055.692.000,00	84.702.431.194,00	95,11
Belanja Modal	22.171.202.000,00	21.905.461.405,00	98,80
Total Belanja Bruto	195.514.015.000,00	190.711.584.773,00	97,54
Pengembalian Belanja	0,00	(853.883.752,00)	0,00
Total Belanja Netto	195.514.015.000,00	189.857.701.021,00	97,11

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 10,22 persen dibandingkan pada TA 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 20,39 persen atau Rp14.231.331.581,00;
2. Realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar 17,99 persen atau Rp18.410.343.800,00;
3. Realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 44,31 persen atau Rp17.432.152.177,00.

Perbandingan Realisasi Belanja (netto) TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	84.018.523.695,00	69.787.192.114,00	14.231.331.581,00	20,39
Belanja Barang	83.934.300.921,00	102.344.644.721,00	(18.410.343.800,00)	(17,99)
Belanja Modal	21.904.876.405,00	39.337.028.582,00	(17.432.152.177,00)	(44,31)
Jumlah Belanja Netto	189.857.701.021,00	211.468.865.417,00	(21.611.164.396,00)	(10,22)

Belanja Pegawai

Rp84.018.523.695,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah Rp84.018.523.695,00 dari anggaran sebesar Rp84.287.121.000,00 atau 99,68 persen. Bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp14.231.331.581,00 atau 20,39 persen. Anggaran Belanja Pegawai hanya terdapat pada Sakter ANRI Jakarta. Rincian realisasi belanja pegawai TA 2018 dan perbandingan belanja pegawai (netto) 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42.735.451.000,00	42.562.856.345,00	99,60
Belanja Lembur	134.820.000,00	133.848.000,00	99,28
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	41.416.850.000,00	41.406.987.829,00	99,98
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	84.287.121.000,00	84.103.692.174,00	99,78
Pengembalian Belanja Pegawai		(85.168.479,00)	
Jumlah Belanja Pegawai Netto	84.287.121.000,00	84.018.523.695,00	99,68

Perbandingan Belanja Pegawai (netto) TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42.562.298.306,00	39.424.677.346,00	3.137.620.960,00	7,96
Belanja Lembur	133.848.000,00	159.981.000,00	(26.133.000,00)	(16,34)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	41.322.377.389,00	30.202.533.768,00	11.119.843.621,00	36,82
Jumlah Belanja Pegawai Netto	84.018.523.695,00	69.787.192.114,00	14.231.331.581,00	20,39

B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja gaji dan tunjangan PNS (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp42.562.298.306,00 atau 99,60 persen dari anggaran sebesar Rp42.735.451.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp3.137.620.960,00 atau 7,96 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	26.106.362.880,00	24.759.658.400,00	1.346.704.480,00	5,44
Belanja Pembulatan Gaji PNS	354.923,00	306.139,00	48.784,00	15,94
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.850.108.390,00	1.680.556.650,00	169.551.740,00	10,09
Belanja Tunj. Anak PNS	496.840.234,00	457.116.820,00	39.723.414,00	8,69
Belanja Tunj. Struktural PNS	2.155.580.000,00	2.005.700.000,00	149.880.000,00	7,47
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.932.502.000,00	2.388.114.000,00	544.388.000,00	22,80
Belanja Tunj. PPh PNS	279.056.878,00	229.621.084,00	49.435.794,00	21,53
Belanja Tunj. Beras PNS	1.289.945.040,00	1.247.724.180,00	42.220.860,00	3,38
Belanja Uang Makan PNS	3.847.526.000,00	3.242.170.000,00	605.356.000,00	18,67
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.143.800.000,00	3.042.400.000,00	101.400.000,00	3,33
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunj. Umum PNS	460.780.000,00	379.165.000,00	81.615.000,00	21,52
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	42.562.856.345,00	39.432.532.273,00	3.130.324.072,00	7,94
Pengembalian belanja pegawai	(558.039,00)	(7.854.927,00)	7.296.888,00	(92,90)
Jumlah Belanja Pegawai Netto	42.562.298.306,00	39.424.677.346,00	3.137.620.960,00	7,96

Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (netto) Tahun 2018 sebesar Rp42.562.298.306,00 sedangkan Beban Gaji dan Tunjangan PNS (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp42.562.710.830,00 terdapat selisih Rp412.524,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PNS	42.562.298.306,00	42.562.710.830,00	(412.524,00)
Belanja/Beban Gaji Pokok PNS	26.106.362.880,00	26.106.739.980,00	(377.100,00)
Belanja/Beban Pembulatan Gaji PNS	354.923,00	354.923,00	0,00
Pengembalian Belanja/Beban Pembulatan Gaji PNS	(3.039,00)	(3.039,00)	0,00
Belanja/Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.850.108.390,00	1.850.125.100,00	(16.710,00)
Belanja/Beban Tunj. Anak PNS	496.840.234,00	496.840.234,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. Struktural PNS	2.155.580.000,00	2.155.580.000,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. Fungsional PNS	2.932.502.000,00	2.932.502.000,00	0,00
Pengembalian Belanja/Beban Tunj. Fungsional PNS	(555.000,00)	(555.000,00)	0,00
Belanja/Beban Tunj. PPh PNS	279.056.878,00	279.075.592,00	(18.714,00)
Belanja/Beban Tunj. Beras PNS	1.289.945.040,00	1.289.945.040,00	0,00
Belanja/Beban Uang Makan PNS	3.847.526.000,00	3.847.526.000,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.143.800.000,00	3.143.800.000,00	0,00
Belanja/Beban Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	0,00	0,00	0,00
Belanja/Beban Tunjangan Umum PNS	460.780.000,00	460.780.000,00	0,00

Selisih Belanja/Beban Pegawai antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS		
Beban Gaji Pokok PNS		
201809450448155	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	377.100,00
	Jumlah	377.100,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS		
201809450448156	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	16.710,00
	Jumlah	16.710,00
Beban PPh PNS		
201809450448157	Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	18.714,00
	Jumlah	18.714,00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA		412.524,00

B.3.2 Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp133.848.000,00 atau 99,28 persen dari anggaran sebesar Rp134.820.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp26.133.000,00 atau 16,34 persen. Penurunan realisasi tersebut disebabkan karena pagu anggaran yang lebih rendah dari TA sebelumnya.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Rp	%
Belanja Uang Lembur	133.848.000,00	159.981.000,00	(26.133.000,00)	(16,34)
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	133.848.000,00	159.981.000,00	(26.133.000,00)	(16,34)
Pengembalian belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Netto	133.848.000,00	159.981.000,00	(26.133.000,00)	(16,34)

Realisasi Anggaran Belanja Uang Lembur (netto) Tahun 2018 sebesar Rp133.848.000,00 sedangkan Beban Uang Lembur (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp133.848.000,00. Tidak terdapat selisih diantara keduanya dengan perincian sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Uang Lembur	133.848.000,00	133.848.000,00	0,00
Belanja/Beban Uang Lembur	133.848.000,00	133.848.000,00	0,00
Pengembalian Beban Pegawai (Uang Lembur)	0,00	0,00	0,00

B.3.3 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp41.322.377.389,00 atau 99,77 persen dari anggaran sebesar Rp41.416.850.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp11.119.843.621,00 atau 36,82 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	41.406.987.829,00	30.886.088.767,00	10.520.899.062,00	34,06
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	41.406.987.829,00	30.886.088.767,00	10.520.899.062,00	34,06
Pengembalian belanja pegawai	(84.610.440,00)	(683.554.999,00)	598.944.559,00	(87,62)
Jumlah Belanja Pegawai Netto	41.322.377.389,00	30.202.533.768,00	11.119.843.621,00	36,82

Realisasi Anggaran Belanja Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito (netto) Tahun 2018 sebesar Rp41.322.377.389,00 sedangkan Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp43.179.988.645,00 terdapat selisih Rp1.857.611.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Laporan Operasional (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transit	41.322.377.389,00	43.179.988.645,00	(1.857.611.256,00)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	41.406.987.829,00	43.264.599.085,00	(1.857.611.256,00)
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(84.610.440,00)	(84.610.440,00)	0,00

Selisih Belanja/Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transit antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Tunjangan Khusus		
201801450448009	Pembayaran kekurangan tunjangan pegawai b/n Desember 2017 sesuai SPM/SP2D No.00010/181391302000461	(7.583.329,00)
201809450448158	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan Nov dan Des 2018	1.814.815.061,00
201809450448159	Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI (7 org) bulan Mei s.d Desember 2018	50.379.524,00
Jumlah		1.857.611.256,00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Gaji dan Tunjangan PNS antara LO dengan LRA		1.857.611.256,00

Belanja Barang

Rp83.934.300.921,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp83.934.300.921,00 atau 94,25 persen dari anggaran sebesar Rp89.055.692.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp18.410.343.800,00 atau 17,99 persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran belanja barang dalam rangka menunjang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Rincian Belanja Barang TA 2018 dan Perbandingan Belanja Barang (netto) TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Barang TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Barang Operasional	6.404.711.000,00	6.368.702.764,00	99,44
Belanja Barang Non Operasional	19.590.822.000,00	16.600.495.624,00	84,74
Belanja Barang Persediaan	3.053.264.000,00	3.033.620.530,00	99,36
Belanja Jasa	18.214.672.000,00	17.768.726.764,00	97,55
Belanja Pemeliharaan	9.476.692.000,00	9.455.408.566,00	99,78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	26.973.955.000,00	26.161.808.533,00	96,99
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.678.460.000,00	2.650.553.413,00	98,96
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.663.116.000,00	2.663.115.000,00	100,00
Jumlah Belanja Barang Bruto	89.055.692.000,00	84.702.431.194,00	95,11
Pengembalian Belanja Barang		(768.130.273,00)	
Jumlah Belanja Barang Netto	89.055.692.000,00	83.934.300.921,00	94,25

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI BELANJA		NAIK (TURUN)	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang Operasional	6.368.702.764,00	6.401.884.342,00	(33.181.578,00)	(0,52)
Belanja Barang Non Operasional	16.600.495.624,00	22.788.135.744,00	(6.187.640.120,00)	(27,15)
Belanja Persediaan	3.033.620.530,00	3.018.360.080,00	15.260.450,00	0,51
Belanja Jasa	17.768.726.764,00	17.621.938.241,00	146.788.523,00	0,83
Belanja Pemeliharaan	9.455.408.566,00	6.947.910.895,00	2.507.497.671,00	36,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	26.161.808.533,00	41.676.433.998,00	(15.514.625.465,00)	(37,23)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.650.553.413,00	5.266.679.625,00	(2.616.126.212,00)	(49,67)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	2.663.115.000,00	164.000.000,00	2.499.115.000,00	1.523,85
Jumlah Belanja Barang Bruto	84.702.431.194,00	103.885.342.925,00	(19.182.911.731,00)	(18,47)
Pengembalian Belanja	(768.130.273,00)	(1.540.698.204,00)	772.567.931,00	(50,14)
Jumlah Belanja Barang Netto	83.934.300.921,00	102.344.644.721,00	(18.410.343.800,00)	(17,99)

B.4.1 Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Operasional (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.355.245.668,00 atau 99,23 persen dari anggaran sebesar Rp6.404.711.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp40.467.674,00 atau 0,63 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Keperluan Perkantoran	3.312.505.779,00	3.134.192.802,00	178.312.977,00	5,69
ANRI Jakarta (KP)	2.513.941.132,00	2.410.379.914,00	103.561.218,00	4,30
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	511.530.500,00	442.040.758,00	69.489.742,00	15,72
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	287.034.147,00	219.917.280,00	67.116.867,00	30,52
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	0,00	61.854.850,00	(61.854.850,00)	(100,00)
Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	714.173.850,00	693.654.250,00	20.519.600,00	2,96
ANRI Jakarta (KP)	688.643.850,00	670.314.250,00	18.329.600,00	2,73
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	25.530.000,00	23.340.000,00	2.190.000,00	9,38
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	84.533.135,00	134.388.290,00	(49.855.155,00)	(37,10)
ANRI Jakarta (KP)	75.899.835,00	119.984.000,00	(44.084.165,00)	(36,74)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	2.971.200,00	2.764.000,00	207.200,00	7,50
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	4.353.000,00	7.902.000,00	(3.549.000,00)	(44,91)
Badan/Kantor (DK)	1.309.100,00	3.738.290,00	(2.429.190,00)	(64,98)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.497.685.000,00	1.972.249.000,00	(474.564.000,00)	(24,06)
ANRI Jakarta (KP)	609.480.000,00	762.450.000,00	(152.970.000,00)	(20,06)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	74.730.000,00	77.160.000,00	(2.430.000,00)	(3,15)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	138.360.000,00	0,00	138.360.000,00	0,00
Badan/Kantor (DK)	675.115.000,00	1.132.639.000,00	(457.524.000,00)	(40,39)
Belanja Barang Operasional Lainnya	759.805.000,00	467.400.000,00	292.405.000,00	62,56
ANRI Jakarta (KP)	737.805.000,00	467.400.000,00	270.405.000,00	57,85
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto	6.368.702.764,00	6.401.884.342,00	(33.181.578,00)	(0,52)
Pengembalian belanja Barang	(13.457.096,00)	(6.171.000,00)	(7.286.096,00)	118,07
Jumlah Belanja Barang Netto	6.355.245.668,00	6.395.713.342,00	(40.467.674,00)	(0,63)

Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional (netto) Tahun 2018 sebesar Rp6.355.245.668,00 sedangkan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2018 sebesar Rp6.348.874.168,00 terdapat selisih Rp6.371.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3.312.505.779,00	3.306.134.279,00	6.371.500,00
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	714.173.850,00	714.173.850,00	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	84.533.135,00	84.533.135,00	0,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.497.685.000,00	1.497.685.000,00	0,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	759.805.000,00	759.805.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto		6.368.702.764,00	6.362.331.264,00	6.371.500,00
Pengembalian belanja Barang		(13.457.096,00)	(13.457.096,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		6.355.245.668,00	6.348.874.168,00	6.371.500,00

Selisih Belanja Barang Operasional antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Operasional		
Beban/Belanja Keperluan Perkantoran (521111)		
201804450448012	Pembayaran Tagihan Koran Tempo & Media Indonesia beban bln Nop-Des 2017	3.520.000,00
201804450448013	Pembayaran Tagihan TV kabel & Internet untuk Kantor Pusat & Rumah Dinas ANRI beban bln Desember 2017	2.851.500,00
Jumlah		6.371.500,00
Jumlah Selisih LRA & LO Belanja / Barang Operasional		6.371.500,00

B.4.2 Belanja Barang Non Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.580.448.124,00 atau 84,63 persen dari anggaran sebesar Rp19.590.822.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp6.179.698.870,00 atau 27,15 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Bahan	9.534.141.624,00	15.261.514.914,00	(5.727.373.290,00)	(37,53)
ANRI Jakarta (KP)	6.171.896.974,00	10.801.793.005,00	(4.629.896.031,00)	(42,86)
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	10.432.000,00	61.236.200,00	(50.804.200,00)	(82,96)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	790.088.000,00	624.277.250,00	165.810.750,00	26,56
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	1.953.991.900,00	3.102.770.499,00	(1.148.778.599,00)	(37,02)
Badan/Kantor (DK)	607.732.750,00	671.437.960,00	(63.705.210,00)	(9,49)
Belanja Honor Output Kegiatan	5.073.737.000,00	5.363.812.500,00	(290.075.500,00)	(5,41)
ANRI Jakarta (KP)	2.438.790.000,00	2.767.287.500,00	(328.497.500,00)	(11,87)
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	31.200.000,00	64.600.000,00	(33.400.000,00)	(51,70)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	2.018.698.000,00	1.589.100.000,00	429.598.000,00	27,03
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	37.700.000,00	64.425.000,00	(26.725.000,00)	(41,48)
Badan/Kantor (DK)	547.349.000,00	878.400.000,00	(331.051.000,00)	(37,69)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.992.617.000,00	2.162.808.330,00	(170.191.330,00)	(7,87)
ANRI Jakarta (KP)	1.961.017.000,00	2.030.668.330,00	(69.651.330,00)	(3,43)
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	0,00	94.525.000,00	(94.525.000,00)	(100,00)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	31.600.000,00	37.360.000,00	(5.760.000,00)	(15,42)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	0,00	255.000,00	(255.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Barang Bruto	16.600.495.624,00	22.788.135.744,00	(6.187.640.120,00)	(27,15)
Pengembalian belanja Barang	(20.047.500,00)	(27.988.750,00)	7.941.250,00	(28,37)
Jumlah Belanja Barang Netto	16.580.448.124,00	22.760.146.994,00	(6.179.698.870,00)	(27,15)

Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional (netto) Tahun 2018 sebesar Rp16.580.448.124,00 sedangkan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2018 sebesar Rp16.572.948.124,00. Terdapat selisih sebesar Rp7.500.000,00 antara LRA dengan LO dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
521211	Belanja Bahan	9.534.141.624,00	9.526.641.624,00	7.500.000,00
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.073.737.000,00	5.073.737.000,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.992.617.000,00	1.992.617.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto		16.600.495.624,00	16.592.995.624,00	7.500.000,00
Pengembalian belanja Barang		(20.047.500,00)	(20.047.500,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		16.580.448.124,00	16.572.948.124,00	7.500.000,00

Selisih Belanja/Beban Barang Non Operasional (netto) antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Non Operasional		
Beban/Belanja Bahan (521211)		
201812450448166	Reklasifikasi Pesediaan atas Belanja Bahan Pencetakan Faktur untuk kegiatan Laminasi/Reproduksi Arsip/Dokumen Negara di Subdit Layanan Arsip sesuai SPM/SP2D Nomor 00803/181391303015355 tanggal 01/06/2018	7.500.000,00
Jumlah		7.500.000,00
Jumlah Selisih LRA & LO Belanja / Barang Non Operasional		7.500.000,00

B.4.3 Belanja Barang Persediaan

Realisasi Belanja Persediaan (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.033.620.530,00 atau 99,36 persen dari anggaran sebesar Rp3.053.264.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp15.260.450,00 atau 0,51 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.033.620.530,00	3.018.360.080,00	15.260.450,00	0,51
ANRI Jakarta (KP)	2.638.975.500,00	2.788.047.000,00	(149.071.500,00)	(5,35)
Pusat Jasa Kearsipan	214.855.000,00	94.750.000,00	120.105.000,00	126,76
Pusdiklat Kearsipan Bogor	39.331.800,00	0,00	39.331.800,00	0,00
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	140.458.230,00	135.563.080,00	4.895.150,00	3,61
Pngembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	3.033.620.530,00	3.018.360.080,00	15.260.450,00	0,51

Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan (netto) Tahun 2018 sebesar Rp3.033.620.530,00 sedangkan pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp2.989.890.272,00 terdapat selisih Rp43.730.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	3.033.620.530,00	-	3.033.620.530,00
593111	Beban Persediaan Konsumsi	0,00	2.171.486.470,00	(2.171.486.470,00)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	0,00	744.658.938,00	(744.658.938,00)
593149	Beban Persediaan Lainnya	0,00	73.744.864,00	(73.744.864,00)
Jumlah Belanja Barang Bruto		3.033.620.530,00	2.989.890.272,00	43.730.258,00
Pengembalian belanja Barang		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		3.033.620.530,00	2.989.890.272,00	43.730.258,00

Selisih Belanja/Beban Barang Persediaan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional adanya perbedaan pengakuan mengenai Belanja pada LRA dan Beban pada LO.

B.4.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja barang Jasa (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.755.334.264,00 atau 97,48 persen dari anggaran sebesar Rp18.214.672.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp193.276.023,00 atau 1,10 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Langganan Listrik	6.797.917.989,00	7.087.940.416,00	(290.022.427,00)	(4,09)
ANRI Jakarta (KP)	6.518.941.189,00	6.790.476.219,00	(271.535.030,00)	(4,00)
BAST Aceh (KD)	278.976.800,00	297.464.197,00	(18.487.397,00)	(6,21)
Belanja Langganan Telepon	100.002.135,00	113.187.810,00	(13.185.675,00)	(11,65)
ANRI Jakarta (KP)	71.797.882,00	88.968.152,00	(17.170.270,00)	(19,30)
BAST Aceh (KD)	28.204.253,00	24.219.658,00	3.984.595,00	16,45
Belanja Langganan Air	123.330.140,00	52.882.580,00	70.447.560,00	133,22
ANRI Jakarta (KP)	120.538.640,00	50.825.465,00	69.713.175,00	137,16
BAST Aceh (KD)	2.791.500,00	2.057.115,00	734.385,00	35,70
Belanja Jasa Pos dan Giro	5.776.000,00	0,00	5.776.000,00	0,00
ANRI Jakarta (KP)	5.776.000,00	0,00	5.776.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultan	219.880.000,00	205.100.000,00	14.780.000,00	7,21
ANRI Jakarta (KP)	170.050.000,00	205.100.000,00	(35.050.000,00)	(17,09)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	49.830.000,00	0,00	49.830.000,00	0,00
Belanja Sewa	1.059.094.400,00	1.116.751.800,00	(57.657.400,00)	(5,16)
ANRI Jakarta (KP)	928.594.400,00	962.236.800,00	(33.642.400,00)	(3,50)
BAST Aceh (KD)	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	34.500.000,00	49.635.000,00	(15.135.000,00)	(30,49)
Badan/Kantor (DK)	0,00	8.880.000,00	(8.880.000,00)	(100,00)
Belanja Jasa Profesi	2.820.590.000,00	4.852.812.500,00	(2.032.222.500,00)	(41,88)
ANRI Jakarta (KP)	2.063.390.000,00	3.697.462.500,00	(1.634.072.500,00)	(44,19)
BAST Aceh (KD)	0,00	8.900.000,00	(8.900.000,00)	(100,00)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	44.100.000,00	123.100.000,00	(79.000.000,00)	(64,18)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	550.100.000,00	1.008.750.000,00	(458.650.000,00)	(45,47)
Badan/Kantor (DK)	163.000.000,00	14.600.000,00	148.400.000,00	1.016,44
Belanja Jasa Lainnya	6.642.136.100,00	4.193.263.135,00	2.448.872.965,00	58,40
ANRI Jakarta (KP)	6.297.867.000,00	3.893.910.500,00	2.403.956.500,00	61,74
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	99.241.100,00	24.532.435,00	74.708.665,00	304,53
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	245.028.000,00	274.820.200,00	(29.792.200,00)	(10,84)
Jumlah Belanja Barang Bruto	17.768.726.764,00	17.621.938.241,00	146.788.523,00	0,83
Pengembalian belanja Barang	(13.392.500,00)	(59.880.000,00)	46.487.500,00	(77,63)
Jumlah Belanja Barang Netto	17.755.334.264,00	17.562.058.241,00	193.276.023,00	1,10

Realisasi Anggaran Belanja Barang Jasa (netto) Tahun 2018 sebesar Rp17.755.334.264,00 sedangkan pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp17.813.181.366,00 terdapat selisih Rp57.847.102,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih
		LRA (Rp)	LO (Rp)	(Rp)
522111	Belanja Langganan Listrik	6.797.917.989,00	6.845.644.457,00	(47.726.468,00)
522112	Belanja Langganan Telepon	100.002.135,00	98.261.269,00	1.740.866,00
522113	Belanja Langganan Air	123.330.140,00	135.191.640,00	(11.861.500,00)
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	5.776.000,00	5.776.000,00	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	219.880.000,00	219.880.000,00	0,00
522141	Belanja Sewa	1.059.094.400,00	1.059.094.400,00	0,00
522151	Belanja Jasa Profesi	2.820.590.000,00	2.820.590.000,00	0,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	6.642.136.100,00	6.642.136.100,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto		17.768.726.764,00	17.826.573.866,00	(57.847.102,00)
Pengembalian belanja Barang		(13.392.500,00)	(13.392.500,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		17.755.334.264,00	17.813.181.366,00	(57.847.102,00)

Selisih Belanja Barang Jasa antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
201802681464001	Pembayaran beban listrik kantor daerah BAST Aceh beban bln Desember 2017	23.105.828,00
201801450448002	Pembayaran beban listrik Rumah Dinas beban bulan Desember 2017	3.470.819,00
201801450448003	Pembayaran beban langganan listrik Kantor Pusdiklat beban bulan Desember 2017	6.983.210,00
201801450448004	Pembayaran beban listrik Kantor Pusat beban bulan Desember 2017	474.683.259,00
201801450448007	Pembayaran beban listrik Gd. Gajah Mada beban bln Desember 2017	13.431.457,00
201812450448146	Pencatatan Tagihan listrik Gd. Gajah Mada ANRI bln Desember 2018	(15.406.277,00)
201812450448147	Pencatatan Tagihan listrik Gd Gajah Mada bln Desember 2018	(11.649.366,00)
201812450448148	Pencatatan Tagihan listrik Rumah Dinas ANRI bln Desember 2018	(6.243.456,00)
201812450448153	Pencatatan Tagihan listrik ANRI bln Desember 2018	(502.326.730,00)
201812450448154	Pencatatan Tagihan listrik Pusdiklat Bogor bln Desember 2018	(10.344.455,00)
201812681464010	Pencatatan Tagihan listrik BAST Aceh bln Desember 2018	(23.430.757,00)
Jumlah		(47.726.468,00)
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
201801450448001	Pembayaran beban telekomunikasi Pusdiklat Bogor beban bulan Desember 2017	453.685,00
201802681464002	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor BAST Aceh beban bulan Desember 2017	2.590.798,00
201802681464008	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor ANRI Pusat beban bulan Desember 2017	5.224.654,00
201812450448149	Pencatatan Tagihan telekomunikasi ANRI bln Desember 2018	(2.881.136,00)
201812450448160	Pencatatan Tagihan telekomunikasi ANRI Warung Buncit bln Desember 2018	(1.383.804,00)
201812681464012	Pencatatan Tagihan telekomunikasi BAST Aceh bln Desember 2018	(2.263.331,00)
Jumlah		1.740.866,00
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
201801450448005	Pembayaran beban air Pusdiklat ANRI Bogor beban bln Desember 2017	666.200,00
201801450448006	Pembayaran beban air Gd. Gajah Mada ANRI beban bln Desember 2017	4.673.120,00
201802681464003	Pembayaran beban air Kantor BAST Aceh beban bln Desember 2017	255.200,00
201812450448150	Pencatatan Tagihan air PAM gedung Gajah Mada bln Desember 2018	(16.090.120,00)
201812450448151	Pencatatan Tagihan air PAM Pusdiklat Bogor bln Desember 2018	(1.161.100,00)
201812681464011	Pencatatan Tagihan air PAM BAST Aceh bln Desember 2018	(204.800,00)
Jumlah		(11.861.500,00)
Jumlah selisih Beban/Belanja Jasa antara LO dengan LRA		(57.847.102,00)

B.4.5 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.455.408.566,00 atau 99,78 persen dari anggaran sebesar Rp9.476.692.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp2.507.497.671,00 atau 36,09 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.035.109.643,00	2.995.028.776,00	2.040.080.867,00	68,12
ANRI Jakarta (KP)	4.959.582.160,00	2.871.638.410,00	2.087.943.750,00	72,71
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	75.527.483,00	123.390.366,00	(47.862.883,00)	(38,79)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345.740.431,00	327.415.750,00	18.324.681,00	5,60
ANRI Jakarta (KP)	337.240.450,00	319.254.230,00	17.986.220,00	5,63
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	8.499.981,00	8.161.520,00	338.461,00	4,15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	171.385.900,00	209.931.700,00	(38.545.800,00)	(18,36)
ANRI Jakarta (KP)	171.385.900,00	209.931.700,00	(38.545.800,00)	(18,36)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.565.719.312,00	1.283.211.265,00	282.508.047,00	22,02
ANRI Jakarta (KP)	1.408.401.078,00	1.136.872.447,00	271.528.631,00	23,88
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	157.318.234,00	146.338.818,00	10.979.416,00	7,50
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	699.600.000,00	716.400.000,00	(16.800.000,00)	(2,35)
ANRI Jakarta (KP)	699.600.000,00	716.400.000,00	(16.800.000,00)	(2,35)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.437.880.400,00	1.298.860.404,00	139.019.996,00	10,70
ANRI Jakarta (KP)	1.437.880.400,00	1.298.860.404,00	139.019.996,00	10,70
Belanja Pemeliharaan Lainnya	199.972.880,00	117.063.000,00	82.909.880,00	70,83
ANRI Jakarta (KP)	199.972.880,00	117.063.000,00	82.909.880,00	70,83
Jumlah Belanja Barang Bruto	9.455.408.566,00	6.947.910.895,00	2.507.497.671,00	36,09
Pengembalian belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	9.455.408.566,00	6.947.910.895,00	2.507.497.671,00	36,09

Realisasi Anggaran Belanja Barang Pemeliharaan (netto) Tahun 2018 sebesar Rp9.455.408.566,00 sedangkan pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp8.260.737.266,00 terdapat selisih Rp1.194.671.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.035.109.643,00	4.689.610.643,00	345.499.000,00
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345.740.431,00	-	345.740.431,00
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	171.385.900,00	171.385.900,00	0,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.565.719.312,00	1.565.719.312,00	0,00
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	699.600.000,00	-	699.600.000,00
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.437.880.400,00	1.421.380.400,00	16.500.000,00
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	199.972.880,00	199.972.880,00	0,00
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	210.468.131,00	(210.468.131,00)
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)
Jumlah Belanja Barang Bruto		9.455.408.566,00	8.260.737.266,00	1.194.671.300,00
Pengembalian belanja Barang		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		9.455.408.566,00	8.260.737.266,00	1.194.671.300,00

Selisih Belanja/Beban Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.194.671.300,00 antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Tgl. Dok	Nomor SP2D	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Pemeliharaan			
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)			
31/12/2018	201809450448162	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan sekat ruangan basement gedung A sesuai SPM/SP2D No. 00818/181391301019667 tgl. 24/05/2018	30.250.000,00
31/12/2018	201809450448163	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan wisma janus Pusdiklat Kearsipan ANRI Bogor sesuai SPM/SP2D No. 01355/181391302047945 tgl. 31/07/2018	117.150.000,00
31/12/2018	201809450448164	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan sarana berupa pengaspalan jalan dilingkungan ANRI sesuai SPM/SP2D No. 01651/181391302059289 tgl. 03/09/2018	198.099.000,00
Jumlah			345.499.000,00
Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129)			
31/12/2018	201809450448161	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 01995/181391301045288 tgl. 03/10/2018	16.500.000,00
Jumlah			16.500.000,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Pemeliharaan antara LO dengan LRA			361.999.000,00

Selisih mengenai Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp345.740.431,00; Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp699.600.000,00; Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp210.468.131,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang senilai Rp2.200.000,00 akan dijelaskan selanjutnya pada CALK Neraca mengenai Persediaan.

B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.562.118.170,00 atau 94,77 persen dari anggaran sebesar Rp26.973.955.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp15.062.190.797,00 atau 37,08 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Biasa	13.177.331.233,00	19.340.248.998,00	(6.162.917.765,00)	(31,87)
ANRI Jakarta (KP)	9.101.593.608,00	10.564.124.358,00	(1.462.530.750,00)	(13,84)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	338.667.869,00	346.534.499,00	(7.866.630,00)	(2,27)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	132.577.000,00	208.750.849,00	(76.173.849,00)	(36,49)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	173.033.400,00	809.229.417,00	(636.196.017,00)	(78,62)
Badan/Kantor (DK)	3.431.459.356,00	7.411.609.875,00	(3.980.150.519,00)	(53,70)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	931.915.000,00	1.190.350.000,00	(258.435.000,00)	(21,71)
ANRI Jakarta (KP)	741.945.000,00	1.014.845.000,00	(272.900.000,00)	(26,89)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	5.550.000,00	8.700.000,00	(3.150.000,00)	(36,21)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	40.400.000,00	27.950.000,00	12.450.000,00	44,54
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	0,00	18.875.000,00	(18.875.000,00)	(100,00)
Badan/Kantor (DK)	144.020.000,00	119.980.000,00	24.040.000,00	20,04
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.926.665.300,00	11.560.893.000,00	(5.634.227.700,00)	(48,74)
ANRI Jakarta (KP)	4.405.658.800,00	5.070.752.000,00	(665.093.200,00)	(13,12)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	17.837.500,00	33.195.000,00	(15.357.500,00)	(46,26)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	56.310.000,00	40.400.000,00	15.910.000,00	39,38
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	197.950.000,00	5.043.450.000,00	(4.845.500.000,00)	(96,08)
Badan/Kantor (DK)	1.248.909.000,00	1.373.096.000,00	(124.187.000,00)	(9,04)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.125.897.000,00	9.584.942.000,00	(3.459.045.000,00)	(36,09)
ANRI Jakarta (KP)	5.656.975.000,00	9.079.442.000,00	(3.422.467.000,00)	(37,69)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	363.280.000,00	391.720.000,00	(28.440.000,00)	(7,26)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	105.642.000,00	113.780.000,00	(8.138.000,00)	(7,15)
Jumlah Belanja Barang Bruto	26.161.808.533,00	41.676.433.998,00	(15.514.625.465,00)	(37,23)
Pengembalian belanja Barang	(599.690.363,00)	(1.052.125.031,00)	452.434.668,00	(43,00)
Jumlah Belanja Barang Netto	25.562.118.170,00	40.624.308.967,00	(15.062.190.797,00)	(37,08)

Realisasi Anggaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (netto) Tahun 2018 sebesar Rp25.562.118.170,00 dan pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp25.562.118.170,00, dan tidak terdapat selisih diantara keduanya sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	13.177.331.233,00	13.177.331.233,00	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	931.915.000,00	931.915.000,00	0,00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.926.665.300,00	5.926.665.300,00	0,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.125.897.000,00	6.125.897.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto		26.161.808.533,00	26.161.808.533,00	0,00
Pengembalian belanja Barang		(599.690.363,00)	(599.690.363,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		25.562.118.170,00	25.562.118.170,00	0,00

B.4.6 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.529.010.599,00 atau 94,42 persen dari anggaran sebesar Rp2.678.460.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp2.350.635.603,00 atau 48,17 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.380.809.413,00	957.003.865,00	1.423.805.548,00	148,78
ANRI Jakarta (KP)	1.593.706.188,00	665.958.274,00	927.747.914,00	139,31
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	116.787.000,00	291.045.591,00	(174.258.591,00)	(59,87)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	670.316.225,00	0,00	670.316.225,00	0,00
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	269.744.000,00	4.309.675.760,00	(4.039.931.760,00)	(93,74)
ANRI Jakarta (KP)	269.744.000,00	3.593.219.450,00	(3.323.475.450,00)	(92,49)
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	0,00	716.456.310,00	(716.456.310,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Barang Bruto	2.650.553.413,00	5.266.679.625,00	(2.616.126.212,00)	(49,67)
Pengembalian belanja Barang	(121.542.814,00)	(387.033.423,00)	265.490.609,00	(68,60)
Jumlah Belanja Barang Netto	2.529.010.599,00	4.879.646.202,00	(2.350.635.603,00)	(48,17)

Realisasi Anggaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Luar Negeri (netto) Tahun 2018 sebesar Rp2.529.010.599,00 dan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2018 sebesar Rp2.529.010.599,00 atau tidak terdapat selisih diantara keduanya sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.380.809.413,00	2.380.809.413,00	0,00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	269.744.000,00	269.744.000,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Bruto		2.650.553.413,00	2.650.553.413,00	0,00
Pengembalian belanja Barang		(121.542.814,00)	(121.542.814,00)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		2.529.010.599,00	2.529.010.599,00	0,00

B.4.7 Belanja Barang Lainnya untuk di serahkan Kepada Masyarakat

Realisasi Belanja Barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (netto) 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.663.115.000,00 atau 99,99 persen dari anggaran sebesar Rp2.663.116.000,00. Bila dibandingkan dengan 31 Desember 2017 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp2.506.615.000,00 atau 1.601,67 persen.

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	2.663.115.000,00	164.000.000,00	2.499.115.000,00	1.523,85
ANRI Jakarta (KP)	2.663.115.000,00	164.000.000,00	2.499.115.000,00	1.523,85
Jumlah Belanja Barang Bruto	2.663.115.000,00	164.000.000,00	2.499.115.000,00	1.523,85
Pengembalian belanja Barang	0,00	(7.500.000,00)	7.500.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Barang Netto	2.663.115.000,00	156.500.000,00	2.506.615.000,00	1.601,67

Realisasi Anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (netto) Tahun 2018 sebesar Rp2.663.115.000,00 dan pada Laporan Operasional (netto) Tahun 2018 sebesar Rp2.629.172.965,00. Terdapat selisih sebesar Rp33.942.035,00 yang akan dijelaskan selanjutnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
526311	Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.663.115.000,00	2.629.172.965,00	33.942.035,00
	Jumlah Belanja Barang Bruto	2.663.115.000,00	2.629.172.965,00	33.942.035,00
	Pengembalian belanja Barang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang Netto	2.663.115.000,00	2.629.172.965,00	33.942.035,00

Belanja Modal

Rp21.904.876.405,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.904.876.405,00 atau 98,80 persen dari anggaran sebesar Rp22.171.202.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp17.432.152.177,00 atau 44,31 persen dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh adanya penurunan anggaran dan kebutuhan belanja modal untuk menunjang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur ANRI dan Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real Angg. (%)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.096.397.000,00	5.032.633.755,00	98,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.115.299.000,00	16.115.208.150,00	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	959.506.000,00	757.619.500,00	78,96
Jumlah Belanja Bruto	22.171.202.000,00	21.905.461.405,00	98,80
Pengembalian Belanja		(585.000,00)	
Jumlah Belanja Netto	22.171.202.000,00	21.904.876.405,00	98,80

Perbandingan Realisasi Belanja Modal (netto) TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI BELANJA		NAIK / TURUN	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.032.633.755,00	18.810.759.262,00	(13.778.125.507,00)	(73,25)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.115.208.150,00	16.904.129.000,00	(788.920.850,00)	(4,67)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	757.619.500,00	3.622.140.320,00	(2.864.520.820,00)	(79,08)
Jumlah Belanja Bruto	21.905.461.405,00	39.337.028.582,00	(17.431.567.177,00)	(44,31)
Pengembalian Belanja	(585.000,00)	0,00	(585.000,00)	0,00
Jumlah Belanja Netto	21.904.876.405,00	39.337.028.582,00	(17.432.152.177,00)	(44,31)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak adanya transaksi realisasi belanja modal tanah TA 2018 dikarenakan tidak terdapat alokasi anggaran untuk pembelian belanja modal tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.032.633.755,00 atau 98,75 persen dari anggaran sebesar Rp5.096.397.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2017, realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 13.778.125.507,00 atau 73,25 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya karena kebutuhan untuk belanja modal peralatan dan mesin menurun pada Kantor Pusat ANRI Jakarta, Kantor BAST Aceh dan satker Pusat Jasa Kearsipan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.032.633.755,00	18.810.759.262,00	(13.778.125.507,00)	(73,25)
ANRI Jakarta (KP)	3.340.124.060,00	17.382.142.512,00	(14.042.018.452,00)	(80,78)
Balai Arsip Statis Tsunami (BAST) Aceh	209.943.145,00	522.068.800,00	(312.125.655,00)	(59,79)
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	1.482.566.550,00	906.547.950,00	576.018.600,00	63,54
Jumlah Belanja Modal Bruto	5.032.633.755,00	18.810.759.262,00	(13.778.125.507,00)	(73,25)
Pengembalian Modal Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	5.032.633.755,00	18.810.759.262,00	(13.778.125.507,00)	(73,25)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.114.623.150,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp16.115.299.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.904.129.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp789.505.850,00 atau 4,67 persen. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan TA 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.115.208.150,00	824.670.000,00	15.290.538.150,00	1.854,14
ANRI Jakarta (KP)	14.827.736.150,00	824.670.000,00	14.003.066.150,00	1.698,02
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	1.287.472.000,00	0,00	1.287.472.000,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	16.079.459.000,00	(16.079.459.000,00)	(100,00)
ANRI Jakarta (KP)	0,00	16.021.049.000,00	(16.021.049.000,00)	(100,00)
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	0,00	58.410.000,00	(58.410.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Modal Bruto	16.115.208.150,00	16.904.129.000,00	(788.920.850,00)	(4,67)
Pengembalian Modal Barang	(585.000,00)	0,00	(585.000,00)	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	16.114.623.150,00	16.904.129.000,00	(789.505.850,00)	(4,67)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp757.619.500,00 dari anggaran sebesar Rp959.506.000,00 atau 78,96 persen. Bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp2.864.520.820,00 atau 79,08 persen. Hal ini disebabkan karena tidak adanya realisasi yang signifikan untuk belanja modal lainnya. Rincian dan perbandingan

realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Lainnya	757.619.500,00	3.622.140.320,00	(2.864.520.820,00)	(79,08)
ANRI Jakarta (KP)	737.759.500,00	3.622.140.320,00	(2.884.380.820,00)	(79,63)
Pusdiklat Kearsipan Bogor	19.860.000,00	0,00	19.860.000,00	0,00
Jumlah Belanja Modal (bruto)	757.619.500,00	3.622.140.320,00	(2.864.520.820,00)	(79,08)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal (netto)	757.619.500,00	3.622.140.320,00	(2.864.520.820,00)	(79,08)

Belanja Bantuan Sosial

Rp.0,00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Pada Arsip Nasional RI tidak terdapat belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018

KODE SATKER	NAMA SATKER	Jumlah (Rp)
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-
087.01.070069	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	-
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi	-
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-
087.01.418929	PUSAT JASA KEARSIPAN	-
087.01.418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	-
087.01.450448	ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	-
087.01.681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	-
JUMLAH		-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar minus Rp0,00 dan Rp33.049.600,00 dengan rincian sebagai berikut

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017

KODE SATKER	NAMA SATKER	2018 (Rp)	2017 (Rp)
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	-
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa	-	-
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	-
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	23.966.600,00
087.01.070069	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	-	-
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	-
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	-
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	-
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	-
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	-
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	-
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	-
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	-
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	-
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	-
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	-
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	-
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	-
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	-
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	9.083.000,00
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka	-	-
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	-
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	-
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	-
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	-
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	-
087.01.418929	PUSAT JASA KEARSIPAN	-	-
087.01.418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	-	-
087.01.450448	ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	-	-
087.01.681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	-	-
JUMLAH		-	33.049.600,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 sebesar Rp33.049.600,00 berasal dari satker Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebesar Rp23.966.600,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten sebesar Rp9.083.000,00 merupakan sisa saldo UP/TUP yang belum disetorkan sampai dengan periode pelaporan berakhir per 31 Desember 2017.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP , yaitu LS Bendahara Pengeluaran yang belum didistribusikan kepada para pihak ketiga.

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp.0,00*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak mencatat piutang yang berasal dari PNBP, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBP dan Piutang Lainnya.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
Rp0,00*

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Rp0,00*

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Bagian
Lancar Piutang
TP/TGR Rp0,00

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan
Rp2.268.275.397,00

C.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.268.275.397,00 dan Rp1.385.672.418,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Barang Konsumsi (117111)	1.663.495.020,00	794.742.530,00
ANRI Jakarta (KP)	1.400.708.800,00	704.993.600,00
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	106.584.920,00	76.598.930,00
Pusat Jasa Kearsipan (KP)	153.223.000,00	13.150.000,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor (KP)	2.978.300,00	0,00
Barang untuk Pemeliharaan (117113)	87.994.090,00	95.321.150,00
ANRI Jakarta (KP)	83.188.840,00	93.102.540,00
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	4.805.250,00	2.218.610,00
Barang Persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan ke Masyarakat	453.134.714,00	400.708.613,00
ANRI Jakarta (KP)	453.134.714,00	400.708.613,00
Bahan Baku (117131)	15.878.050,00	40.320.128,00
ANRI Jakarta (KP)	15.458.950,00	39.884.198,00
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	419.100,00	435.930,00
Persediaan Lainnya (117199)	47.773.523,00	54.579.997,00
ANRI Jakarta (KP)	46.676.123,00	52.890.297,00
Balai Arsip Tsunami Aceh (KD)	1.097.400,00	1.689.700,00
Jumlah Persediaan	2.268.275.397,00	1.385.672.418,00

Terdapat kenaikan Persediaan sebesar Rp882.602.979,00 dengan rincian mutasi Persediaan sebagai berikut :

- Pembelian sebesar Rp6.749.575.961,00 berasal dari Belanja Barang Persediaan Konsumsi sebesar Rp3.033.620.530,00; Belanja Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp345.740.431,00; Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp699.600.000,00; Belanja Bahan sebesar Rp7.500.000,00 dan Belanja

- Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.663.115.000,00;
- Beban Persediaan sebesar Rp2.989.890.272,00 berasal dari Pemakaian Barang Konsumsi sebesar Rp2.170.648.270,00; Pemakaian Bahan Baku sebesar Rp744.658.938,00; Pemakaian Persediaan Lainnya sebesar Rp73.497.764,00; Pengurangan Persediaan dikarenakan hasil opname fisik Barang Konsumsi sebesar Rp838.200,00 dan Persediaan lainnya sebesar Rp247.100,00;
 - Beban Pemeliharaan sebesar Rp212.668.131,00 berasal dari Pemakaian Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp210.514.331,00; Pemakaian Suku Cadang sebesar Rp2.200.000,00 dan Penambahan Persediaan hasil opname fisik Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp46.200,00;
 - Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp2.629.172.965,00 berasal dari Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat sebesar Rp2.673.769.272,00 dan Penambahan Persediaan hasil opname fisik sebesar Rp44.596.307,00;
 - Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir yaitu sebesar Rp35.241.614,00 yang berasal dari Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp29.400.670,00 dan Bahan Untuk Pemeliharaan Rp5.994.410,00; Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat sebesar Rp84.066,00, Bahan Baku sebesar Rp56.010,00 dan Persediaan Lainnya Rp13.390,00.

Mutasi Persediaan Tahun 2018

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp)	Pembelian (Rp)	Pemakaian (Rp)	Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat (Rp)	Opname Fisik (Rp)	Penyesuaian Nilai Persediaan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	794.742.530,00	3.069.639.630,00	(2.170.648.270,00)	-	(838.200,00)	(29.400.670,00)	1.663.495.020,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	704.993.600,00	2.678.665.950,00	(1.951.903.500,00)	-	(838.200,00)	(30.200.050,00)	1.400.708.800,00
681464	BAST Aceh	76.598.930,00	136.786.880,00	(107.191.270,00)	-	-	390.380,00	106.584.920,00
418934	Pusdiklat Kearsipan	-	39.331.800,00	(36.391.500,00)	-	-	38.000,00	2.978.300,00
418929	Pusat Jasa Kearsipan	13.150.000,00	214.855.000,00	(75.162.000,00)	-	-	380.000,00	153.223.000,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	95.321.150,00	209.135.481,00	(210.514.331,00)	-	46.200,00	(5.994.410,00)	87.994.090,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	93.102.540,00	199.952.650,00	(203.889.350,00)	-	46.200,00	(6.023.200,00)	83.188.840,00
681464	BAST Aceh	2.218.610,00	9.182.831,00	(6.624.981,00)	-	-	28.790,00	4.805.250,00
117114	Suku Cadang	-	2.200.000,00	(2.200.000,00)	-	-	-	-
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	-	2.200.000,00	(2.200.000,00)	-	-	-	-
117128	Barang persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	400.708.613,00	2.681.515.000,00	-	(2.673.769.272,00)	44.596.307,00	84.066,00	453.134.714,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	400.708.613,00	2.681.515.000,00	-	(2.673.769.272,00)	44.596.307,00	84.066,00	453.134.714,00
117131	Bahan Baku	40.320.128,00	720.160.850,00	(744.658.938,00)	-	-	56.010,00	15.878.050,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	39.884.198,00	718.887.350,00	(743.481.698,00)	-	-	169.100,00	15.458.950,00
681464	BAST Aceh	435.930,00	1.273.500,00	(1.177.240,00)	-	-	(113.090,00)	419.100,00
117199	Persediaan Lainnya	54.579.997,00	66.925.000,00	(73.497.764,00)	-	(247.100,00)	13.390,00	47.773.523,00
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	52.890.297,00	65.210.000,00	(71.150.764,00)	-	(247.100,00)	(26.310,00)	46.676.123,00
681464	BAST Aceh	1.689.700,00	1.715.000,00	(2.347.000,00)	-	-	39.700,00	1.097.400,00
	Jumlah	1.385.672.418,00	6.749.575.961,00	(3.201.519.303,00)	(2.673.769.272,00)	43.557.207,00	(35.241.614,00)	2.268.275.397,00

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00*

C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0,00*

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang jangka panjang pada ANRI dikategorikan lancar dengan tarif 0,50 %. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp216.312.132.396,00*

C.12 Tanah

Tanah yang dimiliki Arsip Nasional RI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp216.312.132.396,00 dan Rp216.312.132.396,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp 216.312.132.396,00
Mutasi tambah:	Rp -
Pembelian	Rp -
Selisih Revaluasi Aset	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2018	Rp 216.312.132.396,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp 216.312.132.396,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Tanah sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Adapun rincian aset Arsip Nasional RI berupa tanah sebagai berikut :

NO.	Keterangan	Luas (m2)	Nilai (Rp)
1	Tanah di jalan Gajah Mada	9.340	111.146.000.000,00
2	Tanah di Jalan Ampera Raya	18.245	72.980.000.000,00
3	Tanah di Pusdiklat Kearsipan ANRI di Bogor	3.659	25.639.260.000,00
4	Tanah rumah negara golongan II di Ragunan	979	3.819.200.396,00
5	Tanah jalan khusus komplek rumah negara	793	2.566.800.000,00
6	Tanah di BAST di Banda Aceh	4.000	160.872.000,00
Total			216.312.132.396,00

*Peralatan dan Mesin
Rp196.135.354.724,00*

C.13 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp196.135.354.724,00 dan Rp195.093.264.253,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp	195.093.264.253,00
Mutasi tambah:		Rp	5.120.133.755,00
Pembelian		Rp	5.049.133.755,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	5.032.633.755,00
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	16.500.000,00
Transfer Masuk		Rp	71.000.000,00
132111	Peralatan dan Mesin	Rp	71.000.000,00
Penyelesaian dengan KDP		Rp	-
Mutasi kurang:		Rp	4.078.043.284,00
Penghentian Aset dari Penggunaan		Rp	4.010.316.104,00
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	Rp	4.010.316.104,00
Pembelian		Rp	67.727.180,00
595112	Beban Aset Ekstrakomtable	Rp	67.727.180,00
Saldo per 31 Desember 2018		Rp	196.135.354.724,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018		Rp	(170.519.136.473,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018		Rp	25.616.218.251,00

Mutasi Tambah berasal sebesar Rp5.120.133.755,00 berasal dari :

- Pembelian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp5.049.133.755,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	ANRI	
		Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	1.714.890.895,00
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3	5.850.000,00
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	3	3.900.000,00
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	6	32.267.400,00
3.05.01	Alat kantor	169	463.179.000,00
3.05.02	Alat rumah tangga	134	621.076.960,00
3.06.01	Alat studio	16	37.447.500,00
3.06.02	Alat Komunikasi	18	22.765.000,00
3.06.03	Peralatan Pemancar	5	91.000.000,00
3.07.01	Alat kedokteran	3	7.371.000,00
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	9	124.361.600,00
3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2	11.204.000,00
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	2	1.536.780,00
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	2	2.700.000,00
3.10.01	Komputer Unit	66	924.021.500,00
3.10.02	Peralatan Komputer	82	934.069.120,00
3.15.03	Alat Eksplorasi dan Topografi	2	4.200.000,00
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	18	47.293.000,00
Total		551	5.049.133.755,00

- Transfer masuk sebesar Rp71.000.000,00 berupa Alat Tensimeter dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor BAST BMN KN/02.03/V.6/039/2018 tanggal 16 Januari 2018 type BPBIO Series Green sebanyak 2 (dua) unit Tahun Pengadaan 2016.

Mutasi Kurang sebesar Rp4.078.043.284,00 berasal dari :

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp4.010.316.104,00 berasal dari penghentian aset dari penggunaan berupa perubahan kondisi peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan (rusak) dan daam proses lelang oleh Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Penghentian Penggunaan Operasional Pemerintah Nomor BA.04/BU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Nomor BA-06/BU/IX/2018 tanggal 06 September 2018, Nomor BA-10/BU/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dan Nomor BA-15/BU/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	571.209.000,00
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5	4.902.342,00
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1	5.013.075,00
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	50.949,00
3.05.01	Alat kantor	446	1.194.648.287,00
3.05.02	Alat rumah tangga	307	350.384.727,00
3.06.01	Alat Studio	1	7.032.000,00
3.06.02	Alat Komunikasi	10	24.697.559,00
3.10.01	Komputer Unit	111	1.730.529.498,00
3.10.02	Peralatan Komputer	36	121.848.667,00
Total		926	4.010.316.104,00

- Beban Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp67.727.180,00 yang berasal dari pembelian Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	1.007.400,00
3.05.01	Alat kantor	7	3.147.500,00
3.05.02	Alat rumah tangga	76	53.875.000,00
3.06.01	Alat studio	11	2.627.500,00
3.06.02	Alat Komunikasi	10	3.000.000,00
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	1	700.000,00
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	2	1.536.780,00
3.10.02	Peralatan Komputer	3	1.125.000,00
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	9	708.000,00
Total		121	67.727.180,00

Gedung dan

Bangunan

Rp232.559.835.154,00

C.14 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp232.559.835.154,00 dan Rp233.874.874.154,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 233.874.874.154,00
Mutasi tambah:		Rp 25.886.354.200,00
Reklasifikasi Masuk		Rp 24.575.474.000,00
Pengembangan dengan Nilai Aset		Rp 147.400.000,00
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 147.400.000,00	
Koreksi Nilai Pencatatan Nilai/Kuantitas		Rp 161.590.000,00
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Rp 161.590.000,00	
Transfer Masuk		Rp 1.001.890.200,00
313221 Transfer Masuk	Rp 1.001.890.200,00	
Selisih Revaluasi Aset		Rp -
Mutasi kurang:		Rp 27.201.393.200,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		Rp 26.199.503.000,00
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Rp 26.199.503.000,00	
Transfer Keluar		Rp 1.001.890.200,00
313211 Transfer Keluar	Rp 1.001.890.200,00	
Saldo per 31 Desember 2018		Rp 232.559.835.154,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018		Rp (57.350.517.341,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018		Rp 175.209.317.813,00

- Mutasi Tambah sebesar Rp25.886.354.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklasifikasi Masuk

Reklasifikasi Masuk Rp24.575.474.000,00 berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018. Pada Tahun 2017 ANRI telah mencatat sebagai barang rampasan, berdasarkan rekomendasi dari Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu dicatat sebagai Transfer Masuk atau Reklasifikasi Masuk tanggal 27 Desember 2018.
 - Pengembangan Nilai Aset

Pengembangan Nilai Aset berasal dari kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dari Gedung A Cilandak (Pemasangan Sekat Basement) Rp30.250.000,00 dan Wisma Janus Pusdiklat (Pemasangan Pintu) Rp117.150.000,00.
 - Koreksi Nilai Pencatatan Nilai/Kuantitas

Koreksi Pencatatan Nilai merupakan biaya pemeliharaan Gedung Warung Buncit yang pada awalnya berupa barang rampasan dari KPK untuk ANRI Tahun 2017. Dilakukan koreksi untuk menambah nilai reklasifikasi masuk sebesar Rp161.590.000,00, sehingga diperoleh nilai yang sama dengan saldo awal.
 - Transfer Masuk

Transfer masuk pada Satker BAST Aceh dari Satker ANRI Jakarta berupa Pagar berdasarkan Surat Nomor PL.02.01/193/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai aset sebesar Rp1.001.890.200,00.

- Mutasi Kurang sebesar Rp27.201.393.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas

Koreksi Pencatatan nilai perolehan Gedung KPK Warung Buncit beserta pemeliharaan Tahun 2017 yang direklas masuk di Tahun 2018 sebesar Rp24.737.064.000,00 dan penyesuaian terhadap perhitungan aset berlebih Gedung Depo Gajah Mada pada saat Revaluasi Aset BMN sebesar Rp1.462.439.000,00 .

- Transfer Keluar

Transfer keluar berupa Pagar berdasarkan surat Nomor PL.02.01/193/2018 tanggal 29 Juni 2018 dari Satker ANRI Jakarta kepada Satker BAST Aceh senilai Rp1.001.890.200,00.

Berikut rincian Gedung dan Bangunan ANRI Tahun Anggaran 2018 :

NO.	Nama Gedung dan Bangunan	Alamat	Lokasi	Nilai Perolehan (Rupiah)
Ekstrakomptable				232.559.835.154,00
1	Gedung Utama Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	1.530.000.000,00
2	Gedung Auxelarry Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	2.486.000.000,00
3	Pagar Permanen Gajah Mada	JL. Gajah Mada	Jakarta	144.344.000,00
4	Gedung E	JL. Ampera Raya	Jakarta	9.892.486.360,00
5	Gedung A	JL. Ampera Raya	Jakarta	12.035.739.863,00
6	Gedung B	JL. Ampera Raya	Jakarta	8.874.528.290,00
7	Gedung D	JL. Ampera Raya	Jakarta	5.176.409.251,00
8	Gedung J	JL. Ampera Raya	Jakarta	112.151.571,00
9	Gedung F	JL. Ampera Raya	Jakarta	15.446.669.699,00
10	Gedung G	JL. Ampera Raya	Jakarta	29.678.920.348,00
11	Gedung C	JL. Ampera Raya	Jakarta	34.069.635.029,00
12	Gedung O	JL. Ampera Raya	Jakarta	25.807.131.463,00
13	Gedung I	JL. Ampera Raya	Jakarta	2.053.198.088,00
14	Selasar Penghubung Gd. O dan Gd. F	JL. Ampera Raya	Jakarta	150.740.520,00
15	Selasar Penghubung Pusdiklat ANRI	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	27.453.965,00
16	Gedung Inventaris	JL. Ampera Raya	Jakarta	1.972.642.354,00
17	Gedung P	JL. Ampera Raya	Jakarta	27.882.571.800,00
18	Gedung Kantor BAST	JL. T. Nyak Arief, Lampineung	Banda Aceh	14.067.170.800,00
19	Gedung H	JL. Ampera Raya	Jakarta	1.090.053.650,00
20	Gedung Kelas Utama Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	1.229.217.000,00
21	Gedung Laboratorium Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	1.644.912.100,00
22	Kantor Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	467.939.820,00
23	Asrama 1 Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	1.381.855.150,00
24	Ground Reservoir Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	117.597.000,00
25	WC Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	36.600.000,00
26	Asrama 2 Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	812.074.220,00
27	Wisma Janus Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	369.100.000,00
28	Pos Jaga	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	56.500.000,00
29	Pos Jaga	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	9.400.000,00
30	Hydrant Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	200.505.250,00
31	Gedung Kantor Pusdiklat	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	4.844.611.672,00
32	Pos Jaga	JL. Ampera Raya	Jakarta	97.840.000,00
33	Pos Jaga Rumah Negara	JL. Ampera Raya	Jakarta	12.797.500,00
34	Record Center	JL. Ampera Raya	Jakarta	1.290.312.700,00
35	Gapura Kanan	JL. Ampera Raya	Jakarta	144.632.438,00
36	Gapura Kiri	JL. Ampera Raya	Jakarta	122.919.900,00
37	Pagar	JL. Ir. H.Juanda	Bogor	208.507.653,00
38	Rumah Dinas Kepala ANRI	JL. Ampera Raya	Jakarta	304.917.000,00
39	Rumah Dinas Deputi Pembinaan	JL. Ampera Raya	Jakarta	420.178.500,00
40	Rumah Dinas Deputi Konservasi	JL. Ampera Raya	Jakarta	550.616.000,00
41	Pagar	JL. T. Nyak Arief, Lampineung	Banda Aceh	1.001.890.200,00
42	Gedung Buncit KPK	JL. Warung Buncit Raya	Jakarta	24.737.064.000,00
Intrakomptable				5.916.000,00
42	Bangunan Genset	JL. Gajah Mada	Jakarta	2.714.000,00
43	Bangunan Pos Jaga Darurat	JL. Gajah Mada	Jakarta	3.202.000,00
Total				232.565.751.154,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp11.741.372.797,00

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.741.372.797,00 dan Rp11.543.273.797,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	11.543.273.797,00
Mutasi tambah:	Rp	198.099.000,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp	198.099.000,00
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	198.099.000,00
Koreksi Nilai/Kuantitas	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	11.741.372.797,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(6.158.324.313,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	5.583.048.484,00

- Mutasi Tambah sebesar Rp198.099.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengembangan Nilai Aset
 - Pengembangan Nilai Aset berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan pengaspalan jalan NUP 2 ANRI Tahun 2018.

Aset Tetap Lainnya
Rp15.627.955.878,00

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp15.627.955.878,00 dan Rp15.346.484.496,00. Terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	15.346.484.496,00
Mutasi tambah:	Rp	401.973.000,00
Pembelian	Rp	401.973.000,00
536111 Belanja Modal Lainnya	Rp	401.973.000,00
Hibah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	120.501.618,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	120.501.618,00
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp	120.501.618,00
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	15.627.955.878,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(60.483.100,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	15.567.472.778,00

- Mutasi Tambah sebesar Rp401.973.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian

Pembelian Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal Lainnya sebesar Rp401.973.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	3	4.477.000,00
	<i>Building A Successful Archival Programme</i>	1	1.662.000,00
	<i>Currents Of Archival Thinking</i>	1	1.612.000,00
	<i>Barriers To Electronic Erm</i>	1	1.203.000,00
6.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2	397.496.000,00
	<i>Alih Media Arsip Kertas, Video ke Digital</i>	1	348.480.000,00
	<i>Film Dokumenter GNB dan Soekarno</i>	1	49.016.000,00
Total		5	401.973.000,00

- Mutasi Kurang sebesar Rp120.501.618,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penghentian Aset dari Penggunaan

Penghentian Aset dari Penggunaan berdasarkan Berita Acara Penghentian Aset dari Penggunaan Nomor BA.04/BU/8/2018 tgl. 10 Agustus 2018 dan Nomor BA-15/BU/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 bahan perpustakaan tercetak sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) buah senilai Rp120.501.618,00.

Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Rp28.583.355.350,00

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp28.583.355.350,00 dan Rp12.468.732.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 12.468.732.200,00
Mutasi tambah:		Rp 16.114.623.150,00
Perolehan/Penambahan		Rp 16.114.623.150,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 16.115.208.150,00
533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung & Bangunan	Rp (585.000,00)
Mutasi kurang:		Rp -
Aset Definitif		Rp -
Saldo per 31 Desember 2018		Rp 28.583.355.350,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018		Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2018		Rp 28.583.355.350,00

Mutasi Tambah sebesar Rp16.114.623.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas pengerjaan Gedung Arsip Kepresidenan di Gedung Arsip Gajah Mada dan Pembangunan Gedung BAST Aceh .

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	SALDO AKHIR
450448	ARSIP NASIONAL RI JAKARTA	12.468.732.200,00	14.827.151.150,00	-	27.295.883.350,00
7.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	12.468.732.200,00	14.827.151.150,00	-	27.295.883.350,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	14.827.736.150,00	-	-
	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	(585.000,00)	-	-
681464	BAST ACEH	-	1.287.472.000,00	-	1.287.472.000,00
7.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	1.287.472.000,00	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.287.472.000,00	-	-
TOTAL		12.468.732.200,00	16.114.623.150,00	-	28.583.355.350,00

Akumulasi Penyusutan C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap

Rp234.088.461.227,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp234.088.461.227,00 dan sebesar Rp243.878.533.963,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	196.135.354.724,00	170.519.136.473,00	25.616.218.251,00
2	Gedung dan Bangunan	232.559.835.154,00	57.350.517.341,00	175.209.317.813,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.741.372.797,00	6.158.324.313,00	5.583.048.484,00
	Jalan dan Jembatan	1.304.109.771,00	1.013.237.780,00	290.871.991,00
	Irigasi	631.759.500,00	181.571.383,00	450.188.117,00
	Jaringan	9.805.503.526,00	4.963.515.150,00	4.841.988.376,00
4	Aset Tetap Lainnya	15.627.955.878,00	60.483.100,00	15.567.472.778,00
	Total	456.064.518.553,00	234.088.461.227,00	221.976.057.326,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2018 terdapat penambahan penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp12.426.907.972,00; Gedung dan Bangunan senilai Rp13.446.268.394,00 dan Jalan, Jembatan, Irigasi dan jaringan senilai Rp376.998.629,00; Pengurangan Penyusutan sebagai akibat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp32.062.478.727,00; Pengurangan Penyusutan dari Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp4.006.169.004,00; Penambahan dari Transfer Masuk senilai Rp58.456.706,00 dan Pengurangan dari Transfer Keluar sebesar Rp30.056.706,00 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Awal (Rp)	Penyusutan Tahun 2018 (Rp)	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp)	Penghentian Aset dari Penggunaan (Rp)	Transfer Masuk (Rp)	Transfer Keluar (Rp)	Akumulasi Penyusutan Akhir (Rp)
1	Peralatan & Mesin	162.069.997.505,00	12.426.907.972,00	-	(4.006.169.004,00)	28.400.000,00	-	170.519.136.473,00
2	Gedung & Bangunan	75.927.296.465,00	13.446.268.394,00	(32.023.047.518,00)	-	30.056.706,00	(30.056.706,00)	57.350.517.341,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.820.756.893,00	376.998.629,00	(39.431.209,00)	-	-	-	6.158.324.313,00
	Jalan & Jembatan	927.117.771,00	135.943.854,00	(49.823.845,00)	-	-	-	1.013.237.780,00
	Irigasi	158.984.505,00	12.194.242,00	10.392.636,00	-	-	-	181.571.383,00
	Jaringan	4.734.654.617,00	228.860.533,00	-	-	-	-	4.963.515.150,00
4	Aset Tetap Lainnya	60.483.100,00	-	-	-	-	-	60.483.100,00
	Jumlah	243.878.533.963,00	26.250.174.995,00	(32.062.478.727,00)	(4.006.169.004,00)	58.456.706,00	(30.056.706,00)	234.088.461.227,00

Aset Tak Berwujud

Rp11.520.424.655,00

C.19 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp11.520.424.655,00 dan Rp11.164.778.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software Komputer	11.520.424.655,00
2	ATB Lainnya	0,00
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		11.520.424.655,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 11.164.778.155,00
Mutasi tambah:		Rp 355.646.500,00
Pembelian		Rp 238.799.500,00
536111	Belanja Modal Lainnya	Rp 238.799.500,00
Penyelesaian Dengan KDP		Rp -
Pengembangan Nilai Aset		Rp 116.847.000,00
536111	Belanja Modal Lainnya	Rp 116.847.000,00
Mutasi kurang:		Rp -
Penghentian aset dari penggunaan		Rp -
Koreksi Pencatatan		Rp -
Saldo per 31 Desember 2018		Rp 11.520.424.655,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018		Rp (9.057.490.982,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018		Rp 2.462.933.673,00

Mutasi Tambah sebesar Rp355.646.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian berasal dari pembelanjaan aplikasi database senilai Rp238.799.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
162151	SOFTWARE	11	238.799.500,00
8.01.01	Aset Tak Berwujud	11	238.799.500,00
	Aplikasi Database Publikasi Dokumentasi	1	49.000.000,00
	Microsoft Office Home and Business 2016	7	24.909.500,00
	Aplikasi E-Pengolahan	1	49.000.000,00
	Aplikasi Sistem Pelayanan Kepegawaian	1	96.030.000,00
	Aplikasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	1	19.860.000,00
Total		11	238.799.500,00

- Pengembangan Nilai Aset yang berasal dari pengembangan aplikasi senilai Rp116.847.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
		(buah)	(Rupiah)
162151	SOFTWARE	0	116.847.000,00
8.01.01	Aset Tak Berwujud	0	116.847.000,00
	Aplikasi SJDIH	0	19.750.000,00
	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	0	97.097.000,00
Total		0	116.847.000,00

Aset Lain-Lain

Rp7.254.929.769,00

C.20 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp7.254.929.769,00 dan Rp4.764.944.283,00 . Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan. Adapun mutasi aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 4.764.944.283,00
Mutasi tambah:		Rp 4.130.817.722,00
Pembelian		Rp -
Reklasifikasi		Rp 4.130.817.722,00
132111	Peralatan dan Mesin	Rp 4.010.316.104,00
135121	Aset Tetap Lainnya	Rp 120.501.618,00
Koreksi Tambah		Rp -
Mutasi kurang:		Rp 1.640.832.236,00
Penghapusan		Rp 1.640.832.236,00
132111	Peralatan dan Mesin	Rp 1.616.866.187,00
135121	Aset Tetap Lainnya	Rp 23.966.049,00
Koreksi Pencatatan		Rp -
Saldo per 31 Desember 2018		Rp 7.254.929.769,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018		Rp (7.124.928.900,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018		Rp 130.000.869,00

Mutasi Tambah senilai Rp4.130.817.722,00 berasal dari :

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berdasarkan Berita Acara Penghentian Aset dari Penggunaan Nomor BA.04/BU/8/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Nomor BA-06/BU/IX/2018 tanggal 06 September 2018, Nomor BA-10/BU/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dan Nomor BA-15/BU/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
Peralatan dan Mesin		926	4.010.316.104,00
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	571.209.000,00
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5	4.902.342,00
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1	5.013.075,00
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	50.949,00
3.05.01	Alat kantor	446	1.194.648.287,00
3.05.02	Alat rumah tangga	307	350.384.727,00
3.06.01	Alat Studio	1	7.032.000,00
3.06.02	Alat Komunikasi	10	24.697.559,00
3.10.01	Komputer Unit	111	1.730.529.498,00
3.10.02	Peralatan Komputer	36	121.848.667,00
Aset Tetap Lainnya		790	120.501.618,00
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	790	120.501.618,00
Total		1.716	4.130.817.722,00

Mutasi Kurang senilai Rp1.640.832.236,00 berasal dari :

- Penghapusan Aset berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 306 Tahun 2018 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin Dengan Tindak Lanjut Penjualan Tanggal 31 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Kuantitas (buah)	Nilai (Rupiah)
Peralatan dan Mesin		506	1.616.866.187,00
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	1.938.360,00
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1	5.013.075,00
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	50.949,00
3.05.01	Alat kantor	332	1.036.061.624,00
3.05.02	Alat rumah tangga	106	74.131.063,00
3.06.02	Alat Komunikasi	9	22.706.980,00
3.10.01	Komputer Unit	31	399.445.668,00
3.10.02	Peralatan Komputer	24	77.518.468,00
Aset Tetap Lainnya		300	23.966.049,00
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	300	23.966.049,00
Total		806	1.640.832.236,00

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp16.182.419.882,00

C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.182.419.882,00 dan Rp13.265.891.166,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
A Aset Tak Berwujud				
1	Software Komputer	11.520.424.655,00	(9.057.490.982,00)	2.462.933.673,00
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		11.520.424.655,00	(9.057.490.982,00)	2.462.933.673,00
B Aset Lain-lain				
Jumlah		7.254.929.769,00	(7.124.928.900,00)	130.000.869,00
Total		18.775.354.424,00	(16.182.419.882,00)	2.592.934.542,00

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya selama Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan beban penyusutan (amortisasi) *Software* senilai Rp456.640.724,00 dan beban penyusutan Aset Lainnya senilai Rp67.657.050,00, Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp4.006.169.004,00 serta Penghapusan BMN yang dihentikan senilai Rp1.613.938.062,00. Mutasi perubahan penyusutan sebagai berikut :

No	Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan Awal (Rp)	Penyusutan Tahun 2018 (Rp)	Penghentian Aset Dari Penggunaan (Rp)	Penghapusan BMN Yang Dihentikan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Akhir (Rp)
1	Software Komputer	8.600.850.258,00	456.640.724,00	-	-	9.057.490.982,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	-	-	-
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4.665.040.908,00	67.657.050,00	4.006.169.004,00	(1.613.938.062,00)	7.124.928.900,00
Jumlah		13.265.891.166,00	524.297.774,00	4.006.169.004,00	(1.613.938.062,00)	16.182.419.882,00

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp2.458.992.441,00*

C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing senilai minus Rp2.458.992.441,00 dan Rp549.493.059,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga Arsip Nasional RI terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar dan belanja barang yang masih harus dibayar. Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	
Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan November dan Desember 2018	1.814.815.061,00
Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI (7 org) bulan Mei s.d Desember 2018	50.379.524,00
Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	377.100,00
Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	16.710,00
Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	18.714,00
Jumlah Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	1.865.607.109,00
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	
Tagihan listrik Gd. Gajah Mada ANRI bln Desember 2018	15.406.277,00
Tagihan listrik Gd. Gajah Mada ANRI bln Desember 2018	11.649.366,00
Tagihan listrik Rumah Dinas ANRI bln Desember 2018	6.243.456,00
Tagihan telekomunikasi ANRI bln Desember 2018	2.881.136,00
Tagihan air PAM gedung Gajah Mada bln Desember 2018	16.090.120,00
Tagihan air PAM Pusdiklat Bogor bln Desember 2018	1.161.100,00
Tagihan listrik ANRI bln Desember 2018	502.326.730,00
Tagihan listrik Pusdiklat Bogor bln Desember 2018	10.344.455,00
Tagihan telekomunikasi ANRI Warung Buncit bln Desember 2018	1.383.804,00
Tagihan listrik BAST Aceh bln Desember 2018	23.430.757,00
Tagihan telekomunikasi BAST Aceh bln Desember 2018	2.263.331,00
Tagihan air BAST Aceh bln Desember 2018	204.800,00
Jumlah Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	593.385.332,00
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.458.992.441,00

*Pendapatan Diterima
di Muka Rp0,00*

C.23 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing senilai minus Rp0,00 dan Rp33.049.600,00. Merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran. Berikut rincian Uang Muka dari KPPN pada akhir TA 2018 dan TA 2017 :

KODE SATKER	NAMA SATKER	2018 (Rp)	2017 (Rp)
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	-
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	-
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	-
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	23.966.600,00
087.01.070069	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	-	-
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	-
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	-
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	-
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	-
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	-
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	-
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	-
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	-
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	-
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	-
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	-
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	-
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	-
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	-
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	-
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	-
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	9.083.000,00
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	-
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	-
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	-
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	-
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	-
087.01.418929	PUSAT JASA KEARSIPAN	-	-
087.01.418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	-	-
087.01.450448	ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	-	-
087.01.681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	-	-
JUMLAH		-	33.049.600,00

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,00*

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Ekuitas
Rp469.273.762.570,00*

C.26 Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp469.273.762.570,00 dan Rp444.260.237.964,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp11.385.593.550,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11.385.593.550,00 dan Rp34.476.486.575,00. Pendapatan tersebut terdiri atas :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Akun

31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan lurang Badan	1.778.884.000,00	1.909.863.000,00	(6,86)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	14.380.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	1.406.904.000,00	1.909.863.000,00	(26,33)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	357.600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	1.881.372.800,00	1.783.717.300,00	5,47
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.881.372.800,00	1.783.717.300,00	5,47
Pendapatan Jasa Lainnya	7.661.138.350,00	6.186.102.800,00	23,84
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	7.661.138.350,00	6.186.102.800,00	23,84
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	0,00	275.475,00	(100,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	275.475,00	(100,00)
Pendapatan Iuran/Denda	64.198.400,00	21.054.000,00	204,92
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	64.198.400,00	21.054.000,00	204,92
Pendapatan Sitaan/Rampasan	0,00	24.575.474.000,00	(100,00)
Pendapatan Sitaan/Rampasan	0,00	24.575.474.000,00	(100,00)
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	11.385.593.550,00	34.476.486.575,00	(66,98)
Jumlah Pendapatan Operasional	11.385.593.550,00	34.476.486.575,00	(66,98)

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja

31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Satuan Kerja	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Dinas Perpustakaan & Kearsipan Prov. Kalimantan Timur	-	20.531,00	(100,00)
Pusat Jasa Kearsipan	7.322.192.050,00	5.782.157.729,00	26,63
Pusdiklat Kearsipan Bogor	2.238.972.800,00	2.114.198.015,00	5,90
ARSIP NASIONAL RI JAKARTA	1.824.275.700,00	26.573.052.800,00	(93,13)
BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH	153.000,00	7.057.500,00	(97,83)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11.385.593.550,00	34.476.486.575,00	(66,98)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya pada ANRI

Jakarta sebesar Rp14.380.000,00;

2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.406.904.000,00 berasal dari Satker ANRI Jakarta;
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp357.600.000,00 pada satker Pusdiklat Kearsipan Bogor;
4. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp1.881.372.800,00 yang berasal dari satker Pusdiklat Kearsipan ANRI;
5. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi sebesar Rp7.661.138.350,00 berasal dari pembenahan, penyimpanan dan pembuatan sistem kearsipan yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp338.793.300,00, Satker BAST Aceh sebesar Rp153.000,00 dan satker Pusat Jasa Kearsipan Rp7.322.192.050,00;
6. Pendapatan Iuran Denda sebesar Rp64.198.400,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta atas kegiatan pekerjaan Pembangunan E-Depot di ANRI TA 2017 oleh PT Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 60110418000079.

Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2018 dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional 2018 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	14.380.000,00	14.380.000,00	-
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung & Bangunan	1.406.904.000,00	1.406.904.000,00	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	357.600.000,00	357.600.000,00	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.881.372.800,00	1.881.372.800,00	-
Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi	7.661.138.350,00	7.661.138.350,00	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	64.198.400,00	64.198.400,00	-
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	107.341.050,00	(107.341.050,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	156.120.724,00	(156.120.724,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0,00	6.228.900,00	(6.228.900,00)
Jumlah Pendapatan PNPB Lainnya	11.385.593.550,00	11.663.284.224,00	(277.690.674,00)

Terdapat Perbedaan Realisasi Pendapatan menurut Laporan Operasional sebesar Rp11.385.593.550,00 sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp11.663.284.224,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp277.690.674,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Selisih (Rp)
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya pada Satker ANRI Jakarta	8.000.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (2017) pada Satker ANRI Jakarta	107.341.050,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (2017) pada Satker ANRI Jakarta	154.410.719,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (2017) pada Satker Pusdiklat Kearsipan	710.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (2017) pada Pusat Jasa Kearsipan	1.000.005,00
Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS pada Satker ANRI Jakarta	6.228.900,00
Jumlah	277.690.674,00

Perbedaan Realisasi Pendapatan menurut Laporan Operasional dengan menurut Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi sumber pendapatan dan ekonomi atau fungsi/program. Pendapatan Lain-Lain pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan klasifikasi pendapatan diluar fungsi dan program institusi dan bukan merupakan klasifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional.

Beban Pegawai

Rp85.876.547.475,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp85.876.547.475,00 dan Rp69.781.238.027,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.095.309.448 atau 23,07 persen.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	42.562.710.830,00	39.411.139.930,00	3.151.570.900,00	8,00
Beban Gaji Pokok PNS	26.106.739.980,00	24.752.292.700,00	1.354.447.280,00	5,47
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0,00	(2.859.300,00)	2.859.300,00	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	354.923,00	306.139,00	48.784,00	15,94
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(3.039,00)	(627,00)	(2.412,00)	384,69
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.850.125.100,00	1.680.093.880,00	170.031.220,00	10,12
Beban Tunj. Anak PNS	496.840.234,00	456.972.874,00	39.867.360,00	8,72
Beban Tunj. Struktural PNS	2.155.580.000,00	2.005.700.000,00	149.880.000,00	7,47
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.932.502.000,00	2.382.584.000,00	549.918.000,00	23,08
Pengembalian Beban Fungsional PNS	(555.000,00)	0,00	(555.000,00)	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	279.075.592,00	229.621.084,00	49.454.508,00	21,54
Beban Tunj. Beras PNS	1.289.945.040,00	1.247.724.180,00	42.220.860,00	3,38
Beban Uang Makan PNS	3.847.526.000,00	3.242.170.000,00	605.356.000,00	18,67
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.143.800.000,00	3.042.400.000,00	101.400.000,00	3,33
Beban Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	460.780.000,00	379.130.000,00	81.650.000,00	21,54
Pengembalian beban Tunjangan Umum PNS	0,00	(4.995.000,00)	4.995.000,00	(100,00)
Beban Lembur	133.848.000,00	159.981.000,00	(26.133.000,00)	(16,34)
Beban Uang Lembur	133.848.000,00	159.981.000,00	(26.133.000,00)	(16,34)
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	43.179.988.645,00	30.210.117.097,00	12.969.871.548,00	42,93
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	43.264.599.085,00	30.893.672.096,00	12.370.926.989,00	40,04
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(84.610.440,00)	(683.554.999,00)	598.944.559,00	(87,62)
Jumlah Beban Pegawai	85.876.547.475,00	69.781.238.027,00	16.095.309.448,00	23,07

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai hanya berada pada ANRI Jakarta yang terdiri dari :

1. Beban Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp42.562.710.830,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp3.151.570.900,00 atau 8,00 persen dibanding 31 Desember 2017;
2. Beban Lembur sebesar Rp133.848.000,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp26.133.000,00 atau 16,34 persen dibandingkan 31 Desember 2017;
3. Beban Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito sebesar Rp43.179.988.085,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp12.969.871.548 atau 42,93 persen dibanding 31 Desember 2017.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (netto) Tahun 2018 sebesar Rp84.018.523.695,00 sedangkan Beban Pegawai (netto) pada Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp85.876.547.475,00 terdapat selisih Rp1.858.023.780,00 atau dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	42.562.710.830,00	42.562.298.306,00	412.524,00
Beban Gaji Pokok PNS	26.106.739.980,00	26.106.362.880,00	377.100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	354.923,00	354.923,00	0,00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(3.039,00)	(3.039,00)	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.850.125.100,00	1.850.108.390,00	16.710,00
Beban Tunj. Anak PNS	496.840.234,00	496.840.234,00	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	2.155.580.000,00	2.155.580.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.932.502.000,00	2.932.502.000,00	0,00
Pengembalian Beban Fungsional PNS	(555.000,00)	(555.000,00)	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	279.075.592,00	279.056.878,00	18.714,00
Beban Tunj. Beras PNS	1.289.945.040,00	1.289.945.040,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	3.847.526.000,00	3.847.526.000,00	0,00
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3.143.800.000,00	3.143.800.000,00	0,00
Beban Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	460.780.000,00	460.780.000,00	0,00
Beban Lembur	133.848.000,00	133.848.000,00	0,00
Beban Uang Lembur	133.848.000,00	133.848.000,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	43.179.988.645,00	41.322.377.389,00	1.857.611.256,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	43.264.599.085,00	41.406.987.829,00	1.857.611.256,00
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(84.610.440,00)	(84.610.440,00)	0,00
Jumlah Beban Pegawai	85.876.547.475,00	84.018.523.695,00	1.858.023.780,00

Selisih Belanja/Beban Pegawai antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban Pegawai		
Beban Gaji Pokok PNS		
201812450448155	Pencatatan Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	377.100,00
Jumlah		377.100,00
Beban Tunjangan Sumai/Istri PNS		
201812450448156	Pencatatan Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	16.710,00
Jumlah		16.710,00
Beban Tunjangan PPh PNS		
201812450448157	Pencatatan Kekurangan gaji atas kenaikan pangkat pengabdian bulan Desember 2018	18.714,00
Jumlah		18.714,00
Beban Tunjangan Khusus		
201801450448009	Pembayaran kekurangan tunjangan pegawai bln Desember 2017 sesuai SPM/SP2D No.00010/181391302000461	(7.583.329,00)
201809450448158	Pencatatan Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan Nov dan Des 2018	1.814.815.061,00
201809450448159	Pencatatan Kekurangan tunjangan kinerja pegawai ANRI (7 org) bulan Mei s.d Desember 2018	50.379.524,00
Jumlah		1.857.611.256,00
Jumlah Selisih Beban/Belanja Pegawai antara LO dengan LRA		1.858.023.780,00

Beban Persediaan

Rp2.989.890.272,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.989.890.272,00 dan Rp3.799.699.418,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp809.809.146,00 atau 21,31 persen. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017 berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
Beban Persediaan Konsumsi	2.171.486.470,00	2.869.558.805,00	(698.072.335,00)	(24,33)
Beban Persediaan Bahan Baku	744.658.938,00	850.924.058,00	(106.265.120,00)	(12,49)
Beban Persediaan Lainnya	73.744.864,00	79.216.555,00	(5.471.691,00)	(6,91)
Jumlah Beban Persediaan	2.989.890.272,00	3.799.699.418,00	(809.809.146,00)	(21,31)

Rincian Beban Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja

31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Satuan Kerja	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	2.767.621.262,00	3.637.629.853,00	(23,92)
BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH	110.715.510,00	80.469.565,00	37,59
PUSAT JASA KEARSIPAN	75.162.000,00	81.600.000,00	(7,89)
PUSDIKLAT KEARSIPAN	36.391.500,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	2.989.890.272,00	3.799.699.418,00	(21,31)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp40.802.730.838,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp40.802.730.838,00 dan Rp46.654.379.717,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp5.851.648.879,00 atau 12,54 persen. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Beban Barang	22.921.822.292,00	29.317.887.414,00	(6.396.065.122,00)	(21,82)
Beban Keperluan Perkantoran	3.306.134.279,00	3.133.327.880,00	172.806.399,00	5,52
Pembelian Beban Keperluan Kantor	0,00	(650.000,00)	650.000,00	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	714.173.850,00	693.654.250,00	20.519.600,00	2,96
Pembelian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	(10.932.096,00)	(5.521.000,00)	(5.411.096,00)	98,01
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	84.533.135,00	134.388.290,00	(49.855.155,00)	(37,10)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.497.685.000,00	1.972.249.000,00	(474.564.000,00)	(24,06)
Pembelian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(2.525.000,00)	0,00	(2.525.000,00)	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	759.805.000,00	433.900.000,00	325.905.000,00	75,11
Beban Bahan	9.526.641.624,00	15.267.906.914,00	(5.741.265.290,00)	(37,60)
Beban Honor Output Kegiatan	5.073.737.000,00	5.363.812.500,00	(290.075.500,00)	(5,41)
Pembelian Beban Honor Output Kegiatan	(20.047.500,00)	(27.988.750,00)	7.941.250,00	(28,37)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.992.617.000,00	2.352.808.330,00	(360.191.330,00)	(15,31)
Beban Jasa	17.813.181.366,00	17.336.121.303,00	477.060.063,00	2,75
Beban Langganan Listrik	6.845.644.457,00	6.668.000.220,00	177.644.237,00	2,66
Beban Langganan Telepon	98.261.269,00	114.314.878,00	(16.053.609,00)	(14,04)
Beban Langganan Air	135.191.640,00	56.008.770,00	79.182.870,00	141,38
Beban Jasa Pos dan Giro	5.776.000,00	0,00	5.776.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultan	219.880.000,00	394.850.000,00	(174.970.000,00)	(44,31)
Beban Sewa	1.059.094.400,00	1.116.751.800,00	(57.657.400,00)	(5,16)
Beban Jasa Profesi	2.820.590.000,00	4.852.812.500,00	(2.032.222.500,00)	(41,88)
Pembelian Beban Jasa Profesi	(13.392.500,00)	(59.880.000,00)	46.487.500,00	(77,63)
Beban Jasa Lainnya	6.642.136.100,00	4.193.263.135,00	2.448.872.965,00	58,40
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	67.727.180,00	371.000,00	67.356.180,00	18.155,30
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	67.727.180,00	371.000,00	67.356.180,00	18.155,30
Jumlah Beban Barang dan Jasa	40.802.730.838,00	46.654.379.717,00	(5.851.648.879,00)	(12,54)

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan jasa terdiri dari :

1. Beban Barang sebesar Rp22.921.822.292,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp6.396.065.122,00 atau 21,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Beban Jasa sebesar Rp17.813.181.366,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp477.060.063,00 atau 2,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Beban Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp67.727.180,00 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp67.356.180,00 atau 18.155,30 persen dari TA sebelumnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	79.295.000,00	109.512.000,00	(27,59)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	142.384.100,00	93.687.490,00	51,98
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa	44.640.000,00	66.261.000,00	(32,63)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	126.671.000,00	129.285.850,00	(2,02)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	86.073.550,00	120.573.000,00	(28,61)
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	114.679.000,00	118.681.000,00	(3,37)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	87.716.000,00	74.580.000,00	17,61
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	64.711.000,00	75.934.000,00	(14,78)
Kantor Arsip Provinsi Jambi	46.835.500,00	71.665.000,00	(34,65)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	82.026.000,00	66.888.000,00	22,63
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	61.663.000,00	67.277.500,00	(8,35)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	66.466.000,00	68.768.000,00	(3,35)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	33.569.000,00	71.133.000,00	(52,81)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	56.282.000,00	75.799.000,00	(25,75)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	35.495.500,00	68.951.750,00	(48,52)
Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	52.328.000,00	89.909.400,00	(41,80)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	39.980.000,00	75.076.000,00	(46,75)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	72.975.000,00	92.265.000,00	(20,91)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	51.966.000,00	82.909.000,00	(37,32)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	36.666.000,00	87.903.000,00	(58,29)
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	40.985.000,00	99.700.800,00	(58,89)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	51.602.000,00	62.397.000,00	(17,30)
Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	70.888.000,00	121.010.000,00	(41,42)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	99.118.200,00	135.298.850,00	(26,74)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	36.660.000,00	52.271.000,00	(29,87)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	54.422.000,00	109.954.000,00	(50,50)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	39.089.000,00	65.904.000,00	(40,69)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33.788.000,00	47.234.000,00	(28,47)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	36.947.500,00	67.769.710,00	(45,48)
Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	38.309.500,00	50.960.000,00	(24,82)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	57.690.000,00	84.694.000,00	(31,88)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	31.566.000,00	53.759.000,00	(41,28)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	20.774.000,00	50.918.900,00	(59,20)
PUSAT JASA KEARSIPAN	3.599.393.147,00	2.861.754.730,00	25,78
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	2.677.363.500,00	4.320.124.784,00	(38,03)
ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	31.447.400.026,00	35.572.566.612,00	(11,60)
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	1.084.313.315,00	1.191.003.341,00	(8,96)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	40.802.730.838,00	46.654.379.717,00	(12,54)

Beban Barang dan Jasa (netto) Tahun 2018 sebesar Rp40.802.730.838,00 sedangkan Belanja Barang dan Jasa (netto) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp40.691.028.056,00 terdapat selisih sebesar Rp111.702.782,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN/BELANJA	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban/Belanja Barang	22.921.822.292,00	22.935.693.792,00	(13.871.500,00)
Beban/Belanja Keperluan Perkantoran	3.306.134.279,00	3.312.505.779,00	(6.371.500,00)
Beban/Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	714.173.850,00	714.173.850,00	0,00
Pengembalian Beban/Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	(10.932.096,00)	(10.932.096,00)	0,00
Beban/Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	84.533.135,00	84.533.135,00	0,00
Beban/Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.497.685.000,00	1.497.685.000,00	0,00
Kerja	(2.525.000,00)	(2.525.000,00)	0,00
Beban/Belanja Barang Operasional Lainnya	759.805.000,00	759.805.000,00	0,00
Beban/Belanja Bahan	9.526.641.624,00	9.534.141.624,00	(7.500.000,00)
Beban/Belanja Honor Output Kegiatan	5.073.737.000,00	5.073.737.000,00	0,00
Pengembalian Beban/Belanja Honor Output Kegiatan	(20.047.500,00)	(20.047.500,00)	0,00
Beban/Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.992.617.000,00	1.992.617.000,00	0,00
Beban/Belanja Jasa	17.813.181.366,00	17.755.334.264,00	57.847.102,00
Beban/Belanja Langganan Listrik	6.845.644.457,00	6.797.917.989,00	47.726.468,00
Beban/Belanja Langganan Telepon	98.261.269,00	100.002.135,00	(1.740.866,00)
Beban/Belanja Langganan Air	135.191.640,00	123.330.140,00	11.861.500,00
Beban/Belanja Pos dan Giro	5.776.000,00	5.776.000,00	0,00
Beban/Belanja Konsultan	219.880.000,00	219.880.000,00	0,00
Beban/Belanja Sewa	1.059.094.400,00	1.059.094.400,00	0,00
Beban/Belanja Jasa Profesi	2.820.590.000,00	2.820.590.000,00	0,00
Pengembalian Beban/Belanja Jasa Profesi	(13.392.500,00)	(13.392.500,00)	0,00
Beban/Belanja Jasa Lainnya	6.642.136.100,00	6.642.136.100,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomptable	67.727.180,00	0,00	67.727.180,00
Beban Aset Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin	67.727.180,00	0,00	67.727.180,00
Jumlah Beban/Barang dan Jasa	40.802.730.838,00	40.691.028.056,00	111.702.782,00

Selisih Belanja/Beban Barang dan Jasa antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional disebabkan adanya jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

Nomor Jurnal	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang		
Beban/Belanja Keperluan Perkantoran (521111)		
201804450448012	Pembayaran Tagihan Koran Tempo & Media Indonesia beban bln Nop-Des 2017	(3.520.000,00)
201804450448013	Pembayaran Tagihan TV kabel & Internet untuk Kantor Pusat & Rumah Dinas ANRI beban bln Desember 2017	(2.851.500,00)
Jumlah		(6.371.500,00)
Beban/Belan Bahan (521211)		
201812450448166	Reklasifikasi Pesediaan atas Belanja Bahan Pencetakan Faktur untuk kegiatan Laminasi/Reproduksi Arsip/Dokumen Negara di Subdit Layanan Arsip sesuai SPM/SP2D Nomor	(7.500.000,00)
Jumlah		(7.500.000,00)
Beban/Belanja Jasa		
Beban/Belanja Langganan Listrik (522111)		
201802681464001	Pembayaran beban listrik kantor daerah BAST Aceh beban bln Desember 2017	(23.105.828,00)
201801450448002	Pembayaran beban listrik Rumah Dinas beban bulan Desember 2017	(3.470.819,00)
201801450448003	Pembayaran beban langganan listrik Kantor Pusdiklat beban bulan Desember 2017	(6.983.210,00)
201801450448004	Pembayaran beban listrik Kantor Pusat beban bulan Desember 2017	(474.683.259,00)
201801450448007	Pembayaran beban listrik Gd. Gajah Mada beban bln Desember 2017	(13.431.457,00)
201812450448146	Pencatatan Tagihan listrik Gd. Gajah Mada ANRI bln Desember 2018	15.406.277,00
201812450448147	Pencatatan Tagihan listrik Gd Gajah Mada bln Desember 2018	11.649.366,00
201812450448148	Pencatatan Tagihan listrik Rumah Dinas ANRI bln Desember 2018	6.243.456,00
201812450448153	Pencatatan Tagihan listrik ANRI bln Desember 2018	502.326.730,00
201812450448154	Pencatatan Tagihan listrik Pusdiklat Bogor bln Desember 2018	10.344.455,00
201812681464010	Pencatatan Tagihan listrik BAST Aceh bln Desember 2018	23.430.757,00
Jumlah		47.726.468,00
Beban/Belanja Langganan Telepon (522112)		
201801450448001	Pembayaran beban telekomunikasi Pusdiklat Kearsipan Bogor beban bulan Desember 2017	(453.685,00)
201802681464002	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor BAST Aceh beban bulan Desember 2017	(2.590.798,00)
201802681464008	Pembayaran beban telekomunikasi Kantor ANRI Pusat beban bulan Desember 2017	(5.224.654,00)
201812450448149	Pencatatan Tagihan telekomunikasi ANRI bln Desember 2018	2.881.136,00
201812450448160	Pencatatan Tagihan telekomunikasi ANRI Warung Buncit bln Desember 2018	1.383.804,00
201812681464012	Pencatatan Tagihan telekomunikasi BAST Aceh bln Desember 2018	2.263.331,00
Jumlah		(1.740.866,00)
Beban/Belanja Langganan Air (522113)		
201801450448005	Pembayaran beban air Pusdiklat ANRI Bogor beban bln Desember 2017	(666.200,00)
201801450448006	Pembayaran beban air Gd. Gajah Mada ANRI beban bln Desember 2017	(4.673.120,00)
201802681464003	Pembayaran beban air Kantor BAST Aceh beban bln Desember 2017	(255.200,00)
201812450448150	Pencatatan Tagihan air PAM gedung Gajah Mada bln Desember 2018	16.090.120,00
201812450448151	Pencatatan Tagihan air PAM Pusdiklat Bogor bln Desember 2018	1.161.100,00
201812681464011	Pencatatan Tagihan air PAM BAST Aceh bln Desember 2018	204.800,00
Jumlah		11.861.500,00
Beban Aset Ekstrakomptable (595112)		
201802450448010	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.0042/181391303001635	45.000.000,00
201803450448011	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin untuk kegiatan peralatan dan fasilitas perkantoran ANRI sesuai SPM/SP2D No.00263/181391303006129	2.150.000,00
201805450448016	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin untuk kegiatan peralatan dan fasilitas perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.0766/181391303014030	4.800.000,00
201805450448017	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin untuk kegiatan daftar arsip film PPFN seri film cerita di ANRI sesuai SPM/SP2D No.0777/181391303014328	2.625.000,00
201805450448018	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.0834/181391303015305	708.000,00
201806450448022	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.0963/181391302037206	1.536.780,00
201809450448059	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.1047/181391303019017	1.252.500,00
201809450448069	Reklasifikasi atas belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kegiatan perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.1923/181391302068115	495.000,00
201812450448140	Reklasifikasi atas belanja modal pembayaran pengadaan peralatan dan mesin untuk kegiatan peralatan dan fasilitas perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.2308/181391303038876	5.855.000,00
201812450448145	Reklasifikasi atas belanja modal pembayaran pengadaan peralatan dan mesin untuk kegiatan peralatan dan fasilitas perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D No.2437/181391303041470	1.220.000,00
201812450448165	Reklasifikasi atas belanja modal pembayaran pengadaan peralatan dan mesin untuk kegiatan peralatan dan fasilitas perkantoran di ANRI sesuai SPM/SP2D	2.084.900,00
Jumlah		67.727.180,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang dan Jasa antara LO dengan LRA		111.702.782,00

Beban Pemeliharaan
Rp8.260.737.266,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.260.737.266,00 dan Rp5.670.365.825,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp2.590.371.441,00 atau 45,68 persen. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 Berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.689.610.643,00	2.537.713.676,00	2.151.896.967,00	84,80
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	171.385.900,00	209.931.700,00	(38.545.800,00)	(18,36)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.565.719.312,00	1.283.211.265,00	282.508.047,00	22,02
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.421.380.400,00	1.298.860.404,00	122.519.996,00	9,43
Beban Pemeliharaan Lainnya	199.972.880,00	117.063.000,00	82.909.880,00	70,83
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	210.468.131,00	217.985.780,00	(7.517.649,00)	(3,45)
Beban Persediaan Suku Cadang	2.200.000,00	5.600.000,00	(3.400.000,00)	(60,71)
Jumlah Beban Persediaan	8.260.737.266,00	5.670.365.825,00	2.590.371.441,00	45,68

Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja

31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Satuan Kerja	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	8.021.266.568,00	5.396.975.211,00	48,63
BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI ACEH	239.470.698,00	273.390.614,00	(12,41)
Jumlah Beban Pemeliharaan	8.260.737.266,00	5.670.365.825,00	45,68

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Pemeliharaan Lainnya, Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan dan Beban Persediaan Suku Cadang.

Beban Pemeliharaan (netto) Tahun 2018 sebesar Rp8.260.737.266,00 sedangkan Belanja Pemeliharaan (netto) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp9.455.408.566,00 terdapat selisih sebesar Rp1.194.671.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS Beban/Belanja	Laporan Operasional (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.689.610.643,00	5.035.109.643,00	(345.499.000,00)
Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	171.385.900,00	171.385.900,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.565.719.312,00	1.565.719.312,00	0,00
Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.421.380.400,00	1.437.880.400,00	(16.500.000,00)
Belanja/Beban Pemeliharaan Lainnya	199.972.880,00	199.972.880,00	0,00
Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	345.740.431,00	(345.740.431,00)
Belanja Persediaan pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	699.600.000,00	(699.600.000,00)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	210.468.131,00	0,00	210.468.131,00
Beban Persediaan Suku Cadang	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Jumlah Belanja/Beban Pemeliharaan	8.260.737.266,00	9.455.408.566,00	(1.194.671.300,00)

Selisih Belanja/Beban Barang Pemeliharaan sebesar Rp1.194.671.300,00 antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran disebabkan adanya jurnal penyesuaian reklasifikasi Aset sebagai berikut :

Tgl. Dok	Nomor SP2D	Keterangan	Nilai (Rp)
Beban/Belanja Barang Pemeliharaan			
Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)			
31/12/2018	201809450448162	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan sekat ruangan basement gedung A sesuai SPM/SP2D No. 00818/181391301019667 tgl. 24/05/2018	30.250.000,00
31/12/2018	201809450448163	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan wisma janus Pusdiklat Kearsipan ANRI Bogor sesuai SPM/SP2D No. 01355/181391302047945 tgl. 31/07/2018	117.150.000,00
31/12/2018	201809450448164	Reklasifikasi beban menjadi aset atas transaksi pekerjaan perbaikan sarana berupa pengaspalan jalan di lingkungan ANRI sesuai SPM/SP2D No. 01651/181391302059289 tgl. 03/09/2018	198.099.000,00
Jumlah			345.499.000,00
Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129)			
31/12/2018	201809450448161	Reklasifikasi Beban menjadi aset atas sarana pendukung pemeliharaan sesuai dengan SPM/SP2D No. 01995/181391301045288 tgl. 03/10/2018	16.500.000,00
Jumlah			16.500.000,00
Jumlah selisih Beban/Belanja Barang Pemeliharaan antara LO dengan LRA			361.999.000,00

Perbedaan selisih mengenai Belanja Barang Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp345.740.431,00; Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp699.600.000,00; Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan senilai Rp210.468.131,00; Beban Persediaan Suku Cadang Rp2.200.000,00 akan dijelaskan selanjutnya pada CALK Neraca mengenai Persediaan.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp28.091.128.769,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp28.091.128.769,00 dan Rp45.488.955.169,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp17.397.826.400,00 atau 38,25 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 Berdasarkan Akun

URAIAN JENIS BEBAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Beban Perjalan Dinas Dalam Negeri	25.562.118.170,00	40.652.653.967,00	(15.090.535.797,00)	(37,12)
Beban Perjalanan Biasa	13.177.331.233,00	19.325.688.998,00	(6.148.357.765,00)	(31,81)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(514.051.863,00)	(877.512.931,00)	363.461.068,00	(41,42)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	931.915.000,00	1.190.350.000,00	(258.435.000,00)	(21,71)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(9.150.000,00)	(8.250.000,00)	(900.000,00)	10,91
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.926.665.300,00	11.589.238.000,00	(5.662.572.700,00)	(48,86)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(16.480.500,00)	(35.454.500,00)	18.974.000,00	(53,52)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.125.897.000,00	9.599.502.000,00	(3.473.605.000,00)	(36,19)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(60.008.000,00)	(130.907.600,00)	70.899.600,00	(54,16)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.529.010.599,00	4.836.301.202,00	(2.307.290.603,00)	(47,71)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.380.809.413,00	957.003.865,00	1.423.805.548,00	148,78
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(117.888.126,00)	(90.482.571,00)	(27.405.555,00)	30,29
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	269.744.000,00	4.266.330.760,00	(3.996.586.760,00)	(93,68)
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(3.654.688,00)	(296.550.852,00)	292.896.164,00	(98,77)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	28.091.128.769,00	45.488.955.169,00	(17.397.826.400,00)	(38,25)

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	269.224.000,00	316.165.000,00	(14,85)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	316.825.650,00	458.043.300,00	(30,83)
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa	42.127.100,00	97.887.750,00	(56,96)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	386.221.000,00	572.662.150,00	(32,56)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	224.554.902,00	289.660.500,00	(22,48)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara	339.000.700,00	462.952.250,00	(26,77)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	167.043.000,00	234.763.700,00	(28,85)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	100.358.928,00	200.097.700,00	(49,85)
Kantor Arsip Provinsi Jambi	100.175.000,00	185.220.800,00	(45,92)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	147.162.800,00	243.782.800,00	(39,63)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	145.078.900,00	249.949.400,00	(41,96)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	121.354.400,00	258.907.000,00	(53,13)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	159.413.300,00	250.737.894,00	(36,42)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	119.794.530,00	228.953.000,00	(47,68)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	88.998.668,00	203.227.200,00	(56,21)
Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	154.364.200,00	249.197.700,00	(38,06)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	109.770.000,00	253.770.250,00	(56,74)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	244.042.600,00	379.214.600,00	(35,65)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	175.366.216,00	285.767.968,00	(38,63)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	114.964.000,00	218.885.300,00	(47,48)
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	81.132.000,00	200.691.400,00	(59,57)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	86.244.000,00	202.832.913,00	(57,48)
Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	229.108.700,00	380.910.100,00	(39,85)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	298.534.000,00	666.938.000,00	(55,24)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	101.051.225,00	160.864.000,00	(37,18)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	78.208.000,00	310.708.200,00	(74,83)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	61.150.000,00	97.215.000,00	(37,10)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	54.823.000,00	167.000.600,00	(67,17)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	45.391.400,00	157.037.200,00	(71,10)
Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	57.418.465,00	167.965.200,00	(65,82)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	112.998.900,00	335.316.300,00	(66,30)
Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	47.140.000,00	170.695.900,00	(72,38)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	40.582.000,00	146.051.100,00	(72,21)
PUSAT JASA KEARSIPAN	417.838.907,00	627.006.955,00	(33,36)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	1.384.590.165,00	6.926.903.517,00	(80,01)
ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	21.112.211.544,00	28.744.671.587,00	(26,55)
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	356.866.969,00	386.300.935,00	(7,62)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	28.091.128.769,00	45.488.955.169,00	(38,25)

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas :

1. Beban Perjalan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp25.562.118.170,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp15.090.535.797 atau 37,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp2.529.010.599,00 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp2.307.290.603,00 atau 47,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya;

Beban Perjalanan Dinas (netto) Tahun 2018 sebesar Rp28.091.128.769,00 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas (netto) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp28.091.128.769,00, sehingga tidak terdapat selisih antara LRA dengan LO dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN/ BELANJA	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalan Dinas Dalam Negeri	25.562.118.170,00	25.562.118.170,00	0,00
Beban Perjalanan Biasa	13.177.331.233,00	13.177.331.233,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(514.051.863,00)	(514.051.863,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	931.915.000,00	931.915.000,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(9.150.000,00)	(9.150.000,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.926.665.300,00	5.926.665.300,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(16.480.500,00)	(16.480.500,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.125.897.000,00	6.125.897.000,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(60.008.000,00)	(60.008.000,00)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.529.010.599,00	2.529.010.599,00	0,00
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2.380.809.413,00	2.380.809.413,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(117.888.126,00)	(117.888.126,00)	0,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	269.744.000,00	269.744.000,00	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(3.654.688,00)	(3.654.688,00)	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	28.091.128.769,00	28.091.128.769,00	0,00

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp2.629.172.965,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.629.172.965,00 dan Rp13.924.938,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada satker ANRI Jakarta merupakan buku-buku koleksi layanan arsip dan paket pengembangan aplikasi SIKD pada satker ANRI Jakarta.

Uraian	Beban		Kenaikan/Penurunan	
	2018 (Rp)	2017 (Rp)	(Rp)	(%)
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	2.629.172.965,00	13.924.938,00	2.615.248.027,00	18.781,04
Jumlah Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.629.172.965,00	13.924.938,00	2.615.248.027,00	18.781,04

Realisasi Anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (netto) Tahun 2018 sebesar Rp2.663.115.000,00 dan Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (netto) Tahun 2018 pada Laporan Operasional sebesar Rp2.629.172.965,00 terdapat selisih sebesar Rp33.942.035,00 sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian	Realisasi Belanja		Selisih (Rp)
		LO (Rp)	LRA (Rp)	
526311	Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.629.172.965,00	2.663.115.000,00	(33.942.035,00)
Jumlah Belanja Barang Bruto		2.629.172.965,00	2.663.115.000,00	(33.942.035,00)
Pengembalian belanja Barang		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto		2.629.172.965,00	2.663.115.000,00	(33.942.035,00)

Perbedaan selisih mengenai Belanja/Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat senilai Rp33.942.035,00 akan dijelaskan selanjutnya pada CaLK Neraca mengenai Persediaan.

Beban Bantuan Sosial
Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp26.774.472.769,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.774.472.769,00 dan Rp21.057.312.733,00, jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan senilai Rp5.717.160.036,00 atau 27,15 persen. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan Berdasarkan Satuan Kerja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Satuan Kerja	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
ARSIP NASIONAL RI JAKARTA	23.284.169.112,00	25.721.258.167,00	(9,47)
BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI ACEH	627.606.951,00	1.453.194.953,00	(56,81)
PUSDIKLAT KEARSIPAN BOGOR	2.482.500,00	0,00	0,00
PUSAT JASA KEARSIPAN	328.116.993,00	154.795.980,00	111,97
KONSOLIDASI ARSIP NASIONAL RI	2.532.097.213,00	(6.271.936.367,00)	(140,37)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	26.774.472.769,00	21.057.312.733,00	27,15

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017

Berdasarkan Akun

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.426.907.972,00	12.217.483.503,00	209.424.469,00	1,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.446.268.394,00	8.040.882.997,00	5.405.385.397,00	67,22
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	376.998.629,00	434.982.200,00	(57.983.571,00)	(13,33)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	135.943.854,00	157.543.167,00	(21.599.313,00)	(13,71)
Beban Penyusutan Irigasi	12.194.242,00	22.586.878,00	(10.392.636,00)	(46,01)
Beban Penyusutan Jaringan	228.860.533,00	254.852.155,00	(25.991.622,00)	(10,20)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	67.657.050,00	66.602.250,00	1.054.800,00	1,58
Jumlah Penyusutan	26.317.832.045,00	20.759.950.950,00	5.557.881.095,00	26,77
Beban Amortisasi Software	456.640.724,00	297.361.783,00	159.278.941,00	53,56
Beban Penyusutan aset lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Amortisasi	456.640.724,00	297.361.783,00	159.278.941,00	53,56
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	26.774.472.769,00	21.057.312.733,00	5.717.160.036,00	27,15

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
(Rp24.359.919.114,00)*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah surplus kegiatan non operasional untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar defisit Rp24.359.919.114,00 dan surplus Rp499.891.240,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 4.973,04 persen. Rincian dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	NAIK/TURUN (%)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.000.000,00	298.556.789,00	(97,32)
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	8.000.000,00	298.556.789,00	(97,32)
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	26.894.174,00	0,00	0,00
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	26.894.174,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(18.894.174,00)	298.556.789,00	(106,33)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	276.345.764,00	207.747.531,00	33,02
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	273.192.179,00	201.785.736,00	35,39
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	1.025.580,00	710.795,00	44,29
Pusat Jasa Kearsipan	1.380.005,00	0,00	0,00
Pusdiklat Kearsipan Bogor	748.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan & Kearsipan Prov. Aceh	0,00	5.251.000,00	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	24.617.370.704,00	6.413.080,00	383.761,90
Arsip Nasional RI Jakarta (KP)	24.616.690.904,00	6.364.150,00	386.702,49
Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh (KD)	679.800,00	48.930,00	1.289,33
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(24.341.024.940,00)	201.334.451,00	(12.189,85)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(24.359.919.114,00)	499.891.240,00	(4.973,04)

D.11 .1 Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar defisit Rp18.894.174, dan surplus Rp298.556.789,00. Jumlah pada 31 Desember 2018 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp8.000.000,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp26.894.174,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari satker ANRI Jakarta atas Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp8.000.000,00;
- 2) Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Satker ANRI Jakarta atas Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp26.894.174,00.

D.11.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar defisit Rp24.341.024.940,00 dan surplus Rp201.334.451,00. Jumlah pada 31 Desember 2018 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp276.345.764,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp24.617.370.704,00.

D.11.2.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp276.345.764,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir yaitu sebesar Rp6.655.090,00 yang berasal dari ANRI Jakarta sebesar Rp5.211.510,00; dari Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar Rp1.025.580,00; dari Pusdiklat Kearsipan Bogor sebesar Rp38.000,00 dan Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp380.000,00;
- 2) Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.228.900,00 yang berasal dari PT. Taspen bulan Oktober 2018 pada Satker ANRI Jakarta;

- 3) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp107.341.050,00 karena adanya Koreksi atas kelebihan Pengembalian Belanja Pegawai TAYL TA 2017 yang berasal dari Satker ANRI Jakarta;
- 4) Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL senilai Rp156.120.724,00 karena adanya koreksi atas kelebihan Pengembalian Belanja Barang TAYL TA 2017 berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp154.410.719,00, satker Pusat Jasa Kearsipan Rp1.000.005,00 dan Satker Pusdiklat Kearsipan Bogor Rp710.000,00;

D.11.2.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp24.617.370.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan metode penilaian persediaan harga prolehan terakhir yaitu sebesar Rp24.617.370.704,00 yang berasal dari satker ANRI Jakarta sebesar Rp24.616.690.904,00 dan satker BAST Aceh sebesar Rp679.800,00.

Pos Luar Biasa Rp0,00 **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp444.260.237.964,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp444.260.237.964,00 dan Rp422.111.094.833,00.

Defisit LO

Rp208.399.005.918,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp208.399.005.918,00 dan Rp157.489.498.012,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0,00*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 **E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp30.600.039.727,00 **E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp30.600.039.727,00 dan defisit Rp23.195.924.560,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Berikut rincian transaksi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi :

No.	Transaksi Perkiraan	Nilai (Rp)
1	Koreksi Pencatatan (Penghapusan BMN)	(161.590.000,00)
	Gedung dan Bangunan	(24.737.064.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.575.474.000,00
2	Reklasifikasi Masuk (Transfer Masuk)	24.329.719.260,00
	Gedung dan Bangunan	24.575.474.000,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(245.754.740,00)
3	Koreksi Pencatatan Nilai (Transfer Masuk)	159.974.100,00
	Gedung dan Bangunan	161.590.000,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.615.900,00)
4	Koreksi Pencatatan Nilai (Take Out Revaluasi)	6.271.936.367,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.232.505.158,00
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	49.823.845,00
	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(10.392.636,00)
5	Koreksi Pencatatan Nilai (Barang Berlebih)	-
	Gedung dan Bangunan	(1.462.439.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.462.439.000,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		30.600.039.727,00

Koreksi Lain-lain Rp0,00 **E.4.5 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan defisit Rp13.144.839,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp202.812.490.797,00 dan Rp202.847.710.542,00. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antara BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	189.857.701.021,00	211.468.865.417,00
Diterima Dari Entitas Lain	(11.663.284.224,00)	(10.731.461.038,00)
Transfer Masuk	25.589.907.494,00	-
Transfer Keluar	(971.833.494,00)	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	2.110.306.163,00
Jumlah	202.812.490.797,00	202.847.710.542,00

Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp11.663.284.224,00 sedangkan DKEL sebesar Rp189.857.701.021,00.

KODE SATKER	NAMA SATKER	DDEL	DKEL
087.01.020036	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	-	348.519.000,00
087.01.030089	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-	459.209.750,00
087.01.040018	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa	-	86.767.100,00
087.01.050015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	-	512.892.000,00
087.01.060073	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	310.628.452,00
087.01.070069	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	-	453.679.700,00
087.01.080026	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	-	254.759.000,00
087.01.090084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	-	165.069.928,00
087.01.100023	Kantor Arsip Provinsi Jambi	-	147.010.500,00
087.01.110030	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	229.188.800,00
087.01.120030	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	-	206.741.900,00
087.01.130077	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	-	187.820.400,00
087.01.140087	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	192.982.300,00
087.01.150086	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	-	176.076.530,00
087.01.160029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	124.494.168,00
087.01.170030	Kantor Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara	-	206.692.200,00
087.01.180025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	-	149.750.000,00
087.01.190067	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	-	317.017.600,00
087.01.200033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	227.332.216,00
087.01.210026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	-	151.630.000,00
087.01.220030	Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	-	122.117.000,00
087.01.230028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	137.846.000,00
087.01.240022	Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	299.996.700,00
087.01.250038	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	-	397.652.200,00
087.01.260032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	-	137.711.225,00
087.01.280066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	-	132.630.000,00
087.01.290021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	-	100.239.000,00
087.01.300065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka	-	88.611.000,00
087.01.310066	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	-	82.338.900,00
087.01.320068	Kantor Arsip Daerah Prov. Kepulauan Riau	-	95.727.965,00
087.01.330069	Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua Barat	-	170.688.500,00
087.01.340086	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	78.706.000,00
087.01.350092	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	61.356.000,00
087.01.418929	PUSAT JASA KEARSIPAN	7.323.192.055,00	5.714.653.604,00
087.01.418934	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	2.239.682.800,00	4.121.145.465,00
087.01.450448	ARSIP NASIONAL R I JAKARTA	2.100.256.369,00	169.887.567.623,00
087.01.681464	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	153.000,00	3.320.452.295,00
	JUMLAH	11.663.284.224,00	189.857.701.021,00

E.5.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset antar entitas, baik antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan maupun antar entitas akuntansi pada entitas pelaporan yang berbeda. Terdapat Transfer Keluar sebesar Rp971.833.494,00 dan Transfer Masuk sebesar Rp25.589.907.494,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Transaksi	Kuantitas	Entitas Keluar	Entitas Masuk	Transfer Masuk	Transfer Keluar
1	Pagar Semi Permanen	1 unit	Satker ANRI Jakarta	Satke BAST Aceh	1.001.890.200,00	1.001.890.200,00
2	Pagar Semi Permanen (Penyusutan)	1 unit	Satker ANRI Jakarta	Satke BAST Aceh	(30.056.706,00)	(30.056.706,00)
3	Biospace BPBIO 320 (Green)	2 unit	Dit. P2PTM Keemenkes RI	Satker ANRI Jakarta	71.000.000,00	-
4	Biospace BPBIO 320 (Green) (Penyusutan)	2 unit	Dit. P2PTM Keemenkes RI	Satker ANRI Jakarta	(28.400.000,00)	-
5	Gedung Hasil Rasmpanan KPK	1 Unit	KPK	Satker ANRI Jakarta	24.575.474.000,00	-
		Jumlah			25.589.907.494,00	971.833.494,00

Ekuitas Akhir

Rp469.273.762.570,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp469.273.762.570,00 dan Rp444.260.237.964,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal 31 Desember 2018 tidak ada kejadian-kejadian penting yang memberikan dampak buruk secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan Arsip Nasional RI kepada masyarakat umum.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama periode berjalan terkait Pendapatan tidak terdapat perubahan estimasi, sementara terkait dengan belanja telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan belanja serta mempercepat pencapaian kinerja ANRI Tahun Anggaran 2018. Revisi Anggaran karena perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

F.2.2 Khasanah Arsip

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Khasanah Arsip Statis Arsip Nasional RI Nomor KN.03.00/19/2019, bahwa Data Khasanah Arsip Statis kantor ANRI Jakarta (Pusat) adalah arsip yang diserahkan oleh Direktorat Akuisisi dengan Data Khasanah Arsip Statis pada Direktorat Preservasi Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

DATA KHAZANAH ARSIP STATIS ANRI					
<i>Khasanah Arsip Statis ANRI Jakarta (Pusat)</i>					
No	Arsip	Satuan	Jumlah 31 Desember 2017	Jumlah 31 Desember 2018	Kenaikan
1	Kertas	M Linier	29.995,60	30.065,60	70,00
2	Poster	Lembar	336,00	336,00	0,00
3	Kartografi/Peta	Lembar	128.592,00	128.594,00	2,00
4	Foto	Lembar	3.460.796,00	3.460.868,00	72,00
5	Film	Reel	59.002,00	59.002,00	0,00
6	Mikrofilm	Roll	14.463,00	14.463,00	0,00
7	Mikrofische	Fische	14.262,00	14.262,00	0,00
8	Rekaman Suara	Kaset	45.445,00	45.445,00	0,00
9	Reel to Reel Sound	Reel	946,00	946,00	0,00
10	Video	Kaset	25.339,00	25.347,00	8,00
11	Optical Disc	Keping	15.897,00	16.152,00	255,00
12	Piringan Hitam	Keping	101,00	101,00	0,00
13	Flashdisk	Buah	1	1	0,00
14	Arsip Elektronik	Terrabyte	0	350	350,00

Khasanah Arsip BRR pada Balai Arsip Statis Aceh Per 31 Desember 2018

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Masuk	Keluar	
Arsip Kertas	8.745,6 Meter Linier	21,6 Meter Linier	-	8.767,2 Meter Linier
Arsip Kearsitekturan	495 Meter Linier	-	-	495 Meter Linier
Arsip Peta	5,536 Lembar	-	-	5,536 Lembar
Arsip CD/DVD/VCD	1,226 Keping	-	-	1,226 Keping
Arsip Kaset	52 Kaset	-	-	52 Kaset
Arsip Foto	1,441 Lembar	-	-	1,441 Lembar
Arsip Disket	43 Keping	-	-	43 Keping

Sampai dengan periode 31 Desember 2018 terdapat penambahan jumlah arsip tsunami (Arsip BRR NAD-Nias) untuk jenis arsip kertas, yang berasal dari pengolahan arsip BRR-sekretariat Wilayah III (kode satker 889952). Dari hasil kegiatan pengolahan ini terjadi penambahan volume arsip sebanyak 21,6 ML yang terdiri dari penyesuaian pengisian beberapa boks arsip yang diisi melebihi standar boks arsip sebanyak 2,6 ML, penambahan arsip BRR-Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan (D8) sebanyak 18 ML dan pengolahan arsip satuan kerja BRR-Sekretariat Wilayah III sebanyak 1 ML. Untuk jenis arsip kearsitekturan, arsip peta, arsip CD,VCD, DVD, arsip kaset, arsip foto, arsip disket belum ada penambahan maupun pengurangan.

F.2.3 Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap seluruh objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp636.184.075.204,00 yang terdapat pada :

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 634.184.047.204,00
2	Balai Arsip dan Tsunami Aceh	Rp 2.000.028.000,00
Jumlah		Rp 636.184.075.204,00

2. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp80.763.354.160,00 yang terdapat pada :

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi	
1	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp	39.496.367.696,00
2	Balai Arsip dan Tsunami Aceh	Rp	(5.219.191.800,00)
Jumlah		Rp	34.277.175.896,00
Akumulasi Penyusutan		Selisih Nilai Revaluasi	
1	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp	45.087.535.383,00
2	Balai Arsip dan Tsunami Aceh	Rp	1.398.642.881,00
Jumlah		Rp	46.486.178.264,00

3. Revaluasi atas Jalan, Irigasi dan Jaringan dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dengan selisih nilai revaluasi Rp127.434.517,00 yang terdapat pada :

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi	
Jalan dan Jembatan		Rp	(478.720.771,00)
1	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp	(478.720.771,00)
Irigasi		Rp	(593.342.500,00)
1	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp	(593.342.500,00)
Jumlah		Rp	(1.072.063.271,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan & Jembatan		Rp	796.937.688,00
1	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp	796.937.688,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi		Rp	147.691.066,00
1	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp	147.691.066,00
Jumlah		Rp	944.628.754,00

F.2.4 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Terdapat Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor KN.02.03/V.6/039/2018 tanggal 16 Januari 2018 telah dilakukan serah terima BMN hasil pengadaan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun Anggaran 2016 berupa alat kesehatan Tensi Meter Scanner kepada Satker Arsip Nasional RI Jakarta (450448) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Aset/Barang	Merk/Type/Ukuran	Tahun Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi	Asal Dropping
1	BPBIO Series 320 Green Upload Blood Pressure Monitor	BPBIO Series	2016	2 Unit	Rp 35.500.000,00	Rp 71.000.000,00	Baik	Dit. P2PTM Kemenkes RI
Total						Rp 71.000.000,00		

2. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor PL.02.01/193/2018 tanggal 29 Juni 2018 telah dilakukan serah terima BMN hasil pengadaan Satker Arsip Nasional RI Jakarta (450448) Tahun Anggaran 2016 berupa Pagar kepada Balai Arsip Statis Tsunami (BAST) Aceh dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Aset/Barang	Merk/Type/Ukuran	Tahun Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi	Asal Dropping
1	Pagar Semi Permanen Kode Aset 4040104002	268 m ²	2016	1 Unit	Rp 1.001.890.200,00	Rp 1.001.890.200,00	Baik	Arsip Nasional RI Jakarta
Total						Rp 1.001.890.200,00		

3. Berdasarkan LK ANRI TA 2017 (*Audited*) terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa Pendapatan Sitaan/Rampasan pada Kegiatan Operasional. Pendapatan Sitaan/Rampasan bukan merupakan bagian dari klasifikasi pendapatan sesuai dengan fungsi/program Arsip Nasional RI, tetapi dikarenakan adanya hal khusus yakni tidak adanya proses transfer masuk-keluar aset antara pemberi dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak penerima dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Kepada Arsip Nasional RI Nomor : BA-034/24-Ek.11/08/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 sesuai dengan :
- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 159/Pid.Sus/TPK/2015 PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 a.n. Muhammad Nazaruddin;
 - b. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B : PL.01.02/2994/2016 tanggal 11 November 2016 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan Bantuan Prasarana dan Sarana;
 - c. Surat Deputi Bidang Penindakan atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 20/20-26/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 hal Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Negara;
 - d. Surat Deputi Bidang Penindakan atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-140/26/04/2017 tanggal 11 April 2017 hal Pengiriman Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Status Penggunaan Barang Rampasan dari Kepolisian RI dan Lembaga Arsip Nasional RI;
 - e. Surat Deputi Penindakan atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B:-148/26/04/2017 tanggal 18 April 2017 hal Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang Rampasan pada Arsip Nasional Republik Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KM/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Telah diserahkan berupa 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jalan Warung Buncit Raya No. 21 dan 26 RT. 006 RW. 03 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta beserta dokumen kepemilikan atas aset tersebut berupa bangunan kantor permanen (tanah seluas 553 M² dan bangunan seluas 1.600 M²;

Berdasarkan Notulensi Rapat Koordinasi Selisih Transfer Keluar/Masuk Barang Rampasan KPK kepada K/L Penerima tanggal 15 Januari 2019 telah disepakati pencatatan Barang Rampasan pada KPK dicatat pada aplikasi SIMAK-Persediaan sebagai Barang Yang Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat/Pemda dan pada proses ini barang rampasan tersebut dilakukan pencatatan Transfer Keluar oleh pihak pemberi dalam hal ini KPK dan pencatatan Transfer Masuk untuk kemudian dilakukan reklas internal pada K/L oleh pihak penerima dalam hal ini ANRI sebagai Aset Tetap.

No.	Nama Aset/Barang	Merk/Type/Ukuran	Tahun Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi	Asal Dropping
1	Gedung ex Rampasan KPK Jl. Warung Buncit Raya No. 21 dan 26 RT 006 RW 03 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan	Tanah 553 M ² dan Bangunan 1.600 M ²	2017	1 Unit	Rp 24.575.474.000,00	Rp 24.575.474.000,00	Baik Tidak Terawat	Komisi Pemberantasan Korupsi
Total						Rp 24.575.474.000,00		

F.2.5 Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2017 Yang Disetorkan ke Kas Negara Pada Tahun Anggaran 2018

Terdapat pengembalian belanja TA 2017 yang disetorkan ke kas negara pada TA 2018 sebagai akibat tidak tepatnya pelaksana kegiatan dalam menghitung rincian anggaran biaya. Berikut rincian pengembalian belanja TA 2017 yang disetorkan pada TA 2018 :

No.	Tanggal Setor	Uraian	No. NTPN	MAK	Nominal (Rp)
1	03/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Kalimantan Barat tgl. 27-29 Desember 2017 a.n. Dra. Multi Siswati, dkk (3 Org)	090114NOQJHGBP	425912	3.047.700,00
2	03/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Sumatera Barat tgl. 1-6 Oktober 2017 a.n. Nurarta Sitomurang	90B2C4NPULEDOCBP	425912	1.843.300,00
3	04/01/2018	Pengembalian uang harian perjalanan dinas Rapat Diluar Kantor di Banten tgl. 27 November 2017 a.n. Lisa Nurlaila Ningsih	754465AHJD1K2249	425912	150.000,00
4	05/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Bali tgl. 15-17 Mei 2017 a.n. Desi Pratiwi, dkk (4 Org)	FB74D6FIL3NKRLSP	425912	747.616,00
5	05/01/2018	Pengembalian Perjadin a.n. Binner Sitompul Ke Palangkaraya TA 2017	2A76B60CBS5TBPSI	425912	270.000,00
6	08/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Sulawesi Selatan tgl. 13-15 Desember 2017 a.n. Nanik Kurniawati, dkk (2 Org)	95D98GRV0IM0T69	425912	7.200,00
7	09/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Belitung Timur tgl. 29/11/2017 - 01/12/2017 a.n. Nurarta Sitomurang	B59A21OIS3DN10UP	425912	2.171.000,00
8	09/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Belitung Timur tgl. 29/11/2017 - 01/12/2017 a.n. Abdul Cholik	D11FA1OHG547B1UP	425912	112.000,00
9	09/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Kaltara tgl. 6-9 Desember 2017 a.n. Lili Hudiyanto, dkk (2 Org)	B60D81OHG547B1UP	425912	150.000,00
10	10/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta SPM No. 03857	5CB873EVK86NM0N9	425912	550.000,00
11	10/01/2018	Pengembalian Honor Tim Penyusun PERKA ANRI Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset a.n. Mustari Irawan dan Andi Kasman SPM No. 03433	8BD503F148SI9TN9	425912	1.232.500,00
12	10/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta tgl. 8-9 November 2017 a.n. Imam Taufik Gumilar SPM No. 02920	46AE83F0DIEOAVN9	425912	38.000,00
13	11/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya akomodasi kegiatan verifikasi lapangan pemilihan LKD Terbaik	2B86E5D70HHNSTFP	425912	64.000,00
14	11/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan ke Purwokerto tgl. 12-14 2017 a.n. Sulistiyowati	8E8E8F5D8P0A7BFFP	425912	35.500,00
15	11/01/2018	Pengembalian transport rapat koordinasi implementasi SIKD tgl. 21/02/2017 a.n. Een Herdiani, dkk (2 Org)	B762A5DCKV03U9FP	425912	560.000,00
16	12/01/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Tanjung Selor Kaltara tgl. 19-23 April 2017 a.n. Beni Octaviato, dkk (3 Org)	591A987HG9OICK88	425912	1.770.200,00
17	12/01/2018	Pengembalian kelebihan transport koordinasi e-arsip tgl. 4-14 Desember 2017 a.n. Bamdor Sumardiyo, dkk (10 Org)	F3B12872OQAUF088	425912	600.000,00
18	16/01/2018	Pengembalian kelebihan honor narasumber rakor penyelamatan arsip penyiaran tanggal 02/08/2017 a.n. Tato Pujiarto	BB1B54B3KQCTOPA9	425912	85.000,00
19	16/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas sebagai mentor dlm rangka Diklat PIM IV ke Bogor tgl. 15/12/2017	A6E5D4B500MDVOA9	425912	280.000,00
20	17/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas ke NTT dlm rangka verifikasi lapangan pemilihan LKD Teladan a.n. Achmad Sabiqun Nahar	7263167N8Q5NTJ2P	425912	178.800,00
21	17/01/2018	Pengembalian kelebihan honor pengelola APBN bln Januari s.d. Juni 2017 a.n. Wijiyanto	510B267JAG7LCH2P	425912	13.060.000,00
22	18/01/2018	Perjadin a.n. Binner Sitompul Ke Sintang TA 2017	68A445I0BNR9NM2R	425912	440.000,00
23	22/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas dalam rangka rapat konsinyering ke Bogor tanggal 4-5 Mei 2017 a.n. Kismadi	1AB102MJ1S1NST9	425912	600.000,00
24	22/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas dlm rangka rapat konsinyering ke Bogor tgl. 4-5 Mei 2017 a.n. Heni Soraya	C9A812MKDQT1URT9	425912	600.000,00
25	29/01/2018	Pengembalian biaya transport perjalanan dinas dlm rangka rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan kerjasama tgl. 12/12/2017 a.n. Tonny Agung A.A., dkk (6 Org)	54AD20PJEAO45R8P	425912	1.680.000,00
26	30/01/2018	Pengembalian biaya perjalanan dinas dlm rangka menghadiri peresmian musium BPKRI ke Magelang tgl. 8-9 Januari 2017 a.n. M. Taufik	9C6F826MAUKHLT19	425912	263.000,00
27	02/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas luar negeri ke Georgia tgl. 24-29 Oktober 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk (2 Org)	D9473CQDO4CBC59	425912	1.807.500,00
28	06/02/2018	Pengembalian Honor Administrator Pengguna SIRUP bln Januari - Desember 2017 a.n. Ratna	021DE042BPEJ2U79	425912	6.000.000,00
29	08/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas Luar Negeri ke Amerika Serikat tgl. 25-29 Juli 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk (5 Org)	229223807H1JFPO9	425912	8.990.800,00
30	09/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Bogor tgl. 31/03 - 01/04 2017 dlm rangka evaluasi penerbitan majalah arsip a.n. Syaifudin, dkk (18 Org)	A86124BKKOQBKAGP	425912	10.080.000,00
31	14/02/2018	Pengembalian Honor Narasumber Workshop Pengelolaan Jurnal Kearsipan Online Tahun 2017 an. M. Furqon	23F3922BQE6S33B9	425912	190.000,00
32	19/02/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas ke Belitung Timur tgl. 11/05/2017 dlm rangka persiapan pameran arsip wawasan kebangsaan a.n. Cristine Dian Enawati	E66A26BS07CMK95P	425912	144.000,00

33	01/03/2018	Pengembalian honor tim penyusun dan perumus PP tentang tarif PNBPDilingkungan ANRI bln Mei 2017 s.n. Imam	1A44171BPMP0EHUO	425912	425.000,00
34	04/04/2018	Pengembalian honor tim Diorama Arsip Kepresidenan Gd. Gajah Mada Tahun 2017 a.n. Neneng Ridayanti, dkk (6 Org)	1C51036PPR2893Q9	425912	6.384.000,00
35	11/04/2018	Pengembalian Perjalanan Dinas ke LN Australia TA 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk (5 Org)	5938F7BOSMBJ4K5O	425912	1.000.005,00
36	19/04/2018	Pengembalian honor tim penyusun rencana anggaran ANRI bln Desember 2017	E297949GHOMHI69P	425912	250.000,00
37	19/04/2018	Pengembalian pembayaran perjadi ke LN Washington USA Tahun 2017 a.n. Mustari Irawan, dkk	73A6F49HVES67R9P	425912	15.000.000,00
38	19/04/2018	Pengembalian uang representatif perjadi LN Yordania Tahun 2017	6775349POOCOT19P	425912	750.000,00
39	19/04/2018	Pengembalian tiket perjadi LN ke Belanda Tahun 2017	11CE449QC2VK5U9P	425912	6.072.000,00
40	19/04/2018	Pengembalian tiket perjadi LN ke Belanda Tahun 2017 a.n. Diantyo N, dkk (2	83CC549SNODLD29P	425912	1.468.907,00
41	19/04/2018	Pengembalian honorarium Tim Pelaksana kegiatan Tahun 2017 a.n. Mustari	6500849RK86QNO9P	425912	31.739.000,00
42	23/04/2018	Pengembalian kelebihan biaya perjadi ke luar negeri ke Beijing Tahun 2017 a.n.	0AFC37CUORUAH6BP	425912	12.861.946,00
43	23/04/2018	Pengembalian Honorarium Tim Peleksana kegiatan di ANRI Tahun 2017 a.n. M. Taufik	27E747CTF8508FBP	425912	4.462.500,00
44	23/04/2018	Pengembalian kelebihan uang makan pegawai ANRI TA 2017	2D17D7D0IFUTLSBP	425911	9.992.800,00
45	23/04/2018	Pengembalian/Refund tiket perjadi tahun 2017 ke Luar Negeri Washington DC USA a.n. Edi Saptono	A28A47CVQAV001BP	425912	14.812.050,00
46	23/04/2018	Pengembalian kelebihan Honorarium kegiatan ANRI TA 2017 a.n. Widarno, dkk (3 Org)	DBBB37D1CM50I6BP	425912	2.396.000,00
47	23/04/2018	Pengembalian uang representatif an. Multi Siswati	DC2FF7D24HQGT8BP	425912	750.000,00
48	20/04/2018	Pengembalian kelebihan pembayaran uang makan pegawai ANRI Tahun 2017	174D24F3ADF16O28	425911	84.825.200,00
49	24/04/2018	Pengembalian perjadi ke LN Belanda a.n. Diantyo Nugroho, dkk (2 Org) TA 2017	C3B4868L6K08JC48	425912	1.200,00
50	24/04/2018	Pengembalian kelebihan uang makan pegawai ANRI Tahun 2017	53BD88502B4N2H49	425911	12.523.050,00
Jumlah					263.461.774,00

F.2.6 Take Out Revaluasi BMN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai Surat DJKN Nomor S-35/KN/2019 Tanggal 29 Januari 2019 tentang Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima BPK.

Atas kebijakan tersebut, terdapat perbedaan penyajian nilai aset tetap objek revaluasi pada Laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih
1	Tanah	216.312.132.396,00	852.496.207.600,00	(636.184.075.204,00)
2	Gedung dan Bangunan	232.559.835.154,00	268.299.450.050,00	(35.739.614.896,00)
3	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	57.350.517.341,00	22.305.571.010,00	35.044.946.331,00
4	Jalan, Jembatan dan Bangunan Air	1.935.869.271,00	863.806.000,00	1.072.063.271,00
5	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan dan Bangunan Air	1.194.809.163,00	283.162.457,00	911.646.706,00
Jumlah		509.353.163.325,00	1.144.248.197.117,00	(634.895.033.792,00)

F.2.7 Jaminan Pemeliharaan

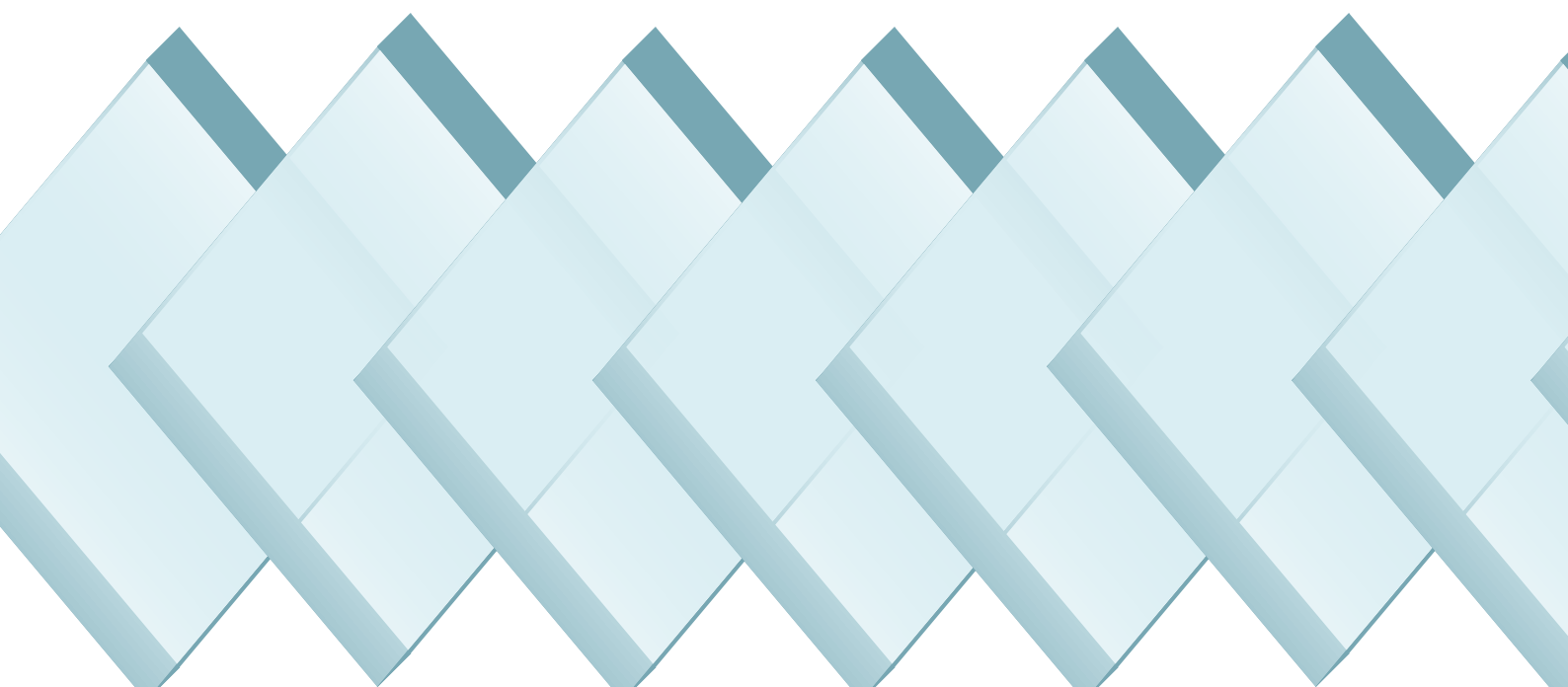
Berdasarkan Bank Garansi Nomor MBG666089874218N Tanggal 18 Desember 2018, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Bandung beralamat Jl. Asia Afrika No. 118-120 2nd Floor, Bandung 40261 (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 KUHP dengan menjamin PT. Karya Dwiputra Pratama beralamat Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52 Bandung (untuk selanjutnya disebut "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia beralamat Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi") untuk membayar setinggi-tingginya Rp717.735.150,00 dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan Wan Prestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Pertama Nomor : 002/BAST/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018 untuk Pembangunan Gedung Arsip Kepresidenan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018, maka Bank membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Bank Garansi berlaku sejak tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada 10 Juni 2019.

F.2.8 Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

Berdasarkan Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep - 211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual diatur kembali ketentuan mengenai segmen akun pada bagan akun standar. Terdapat perubahan kodifikasi pada segmen akun yang dilaporkan pada Arsip Nasional Republik Indonesia berbeda dengan pelaporan pada Tahun Anggaran sebelumnya, sehingga terdapat perbedaan perbandingan pelaporan.

KEP-187/PB/2017		KEP-211/PB/2018	
Kode	Uraian	Kode	Uraian
42	PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK	42	PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK
423	Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	425	Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Dan Luran Badan Usaha
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan/Arsip/Hasil Bongkar Gedung dan Bangunan	42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film dan Survey	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
-	-	42515	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
-	-	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
-	-	4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi
-	-	42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
-	-	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
4232	Pendapatan Jasa	4256	Pendapatan Jasa Lainnya
42321	Pendapatan Jasa I	42569	Pendapatan Jasa Lainnya
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi
-	-	425699	Pendapatan Jasa Lainnya
-	-	4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
42322	Pendapatan Jasa II	42576	Pendapatan Layanan Jasa Bank dan Penutupan Rekening
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
-	-	42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
-	-	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
-	-	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
-	-	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
4237	Pendapatan luran dan Denda	4258	Pendapatan Denda
42375	Pendapatan Denda	42581	Pendapatan Denda I
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
4239	Pendapatan Lain-lain	4259	Pendapatan Lain-lain
42392	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi /	-	-
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	-
42395	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
-	-	42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan
-	-	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2018**